



RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan daerah guna meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu disusun rencana strategis perangkat daerah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam perencanaan strategis perangkat daerah ditetapkan Peraturan Bupati setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
 - BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
 - BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - BAB V PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21) tetap digunakan sebagai Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 56);
- b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025
BUPATI GUNUNGKIDUL
ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR 35.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN,PERMASALAHAN,DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP.....	5
2.1 Gambaran Pelayanan Umum	5
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	5
2.1.2. Sumber Daya Lingkungan Hidup.....	13
2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....	18
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan.....	32
2.1.5. Mitra Dinas Lingkungan Hidup.....	32
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup.....	33
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	33
2.2.2. Isu Strategis.....	34
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN.....	46
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	46
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	47
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	49
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	51
BAB IV PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN,DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	54
4.1 Uraian Program.....	54
4.2 Uraian Kegiatan.....	54
4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif.....	54
4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	116
4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup.....	120
4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	123
BAB V PENUTUP.....	125

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Distribusi Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup	13
Tabel 2.2	Data SDM Berdasarkan Kualifikasi Jabatan,Pendidikan, dan Jenis Kelamin.....	14
Tabel 2.3	Rekapitulasi Inventaris Dinas Lingkungan Hidup	15
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	19
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	21
Tabel 2.6	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah.....	34
Tabel 2.7	Isu Strategis PD.....	45
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	49
Tabel 3.2	SWOT.....	50
Tabel 3.3	Pentahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup.....	51
Tabel 3.4	Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup.....	52
Tabel 3.5	Tujuan,Sasaran,Strategi, dan Arah Kebijakan.....	53
Tabel 4.1	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rancangan Strategis Perangkat Daerah.....	56
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan...	77
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah.....	116
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	122
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci.....	124

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah merupakan suatu usaha yang sistematis dari pelbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, social ekonomi dan aspek lingkungan lainnya sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan maka dibutuhkan suatu perencanaan yang sistematis dan matang, baik melalui perencanaan jangka panjang, menengah maupun jangka pendek, sehingga dapat menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan dan berkelanjutan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan sasaran yang melibatkan pihak terkait.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mensyaratkan Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mensyaratkan setiap penyusunan dokumen perencanaan harus menggunakan berbagai pendekatan berupa pendekatan teknokratis, partisipatif, politis maupun bottom-up dan top-down, Perencanaan PD harus selaras dengan perencanaan pembangunan nasional maupun perencanaan pembangunan daerah. Rencana Srategis (Renstra) merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada prosedur yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun kedepan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan potensi,kekuatan dan kelemahan, peluang dan kendala yang dihadapi.

Dalam penyusunannya, Renstra PD berpedoman pada RPJMD, sehingga tiap PD harus mampu untuk menterjemahkan visi, misi, serta agenda RPJMD berikut strategi, kebijakan, dan capaian program dalam RPJMD. Renstra PD selanjutnya dijabarkan menjadi dokumen perencanaan tahunan PD berupa Rencana Kerja PD, yang pada hakekatnya sesuai dengan perkembangan dan berjalan waktu bisa ditinjau/direvisi.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang merupakan dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam penyusunan Renstra adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 123 tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 116);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah;
15. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2024 Tanggal 5 November 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penetapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup periode 2025-2029 dimaksudkan untuk menentukan arah dan pedoman pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul selama 5 (lima) tahun kedepan sehingga pelaksanaan pembangunan urusan lingkungan hidup bisa dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis, dan berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup adalah:

- a. Untuk dapat digunakan sebagai instrument dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja;
- b. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup;
- c. Memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup;
- d. Mewujudkan peran partisipatif antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang sadar bahwa pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab semua pihak;
- e. Melaksanakan koordinasi kegiatan penataan, pencegahan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemanfaatan, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup. dijabarkan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang;
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan;
	1.3 Maksud dan Tujuan;
	1.4 Sistematika Penulisan.
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.1 Gambaran Pelayanan Umum;
	2.1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
	2.1.3. Sumber Daya Lingkungan Hidup;
	2.1.4. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup;
	2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan.
	2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup
	2.2.2. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;
	2.2.3. Isu Strategis.
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	3.1 Tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup
	3.2 Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup
	3.3 Strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029;
	3.4 Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029.
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	4.1 Uraian Program;
	4.2 Uraian Kegiatan;
	4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif;
	4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah;
	4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup
	4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)
BAB V	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1 GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

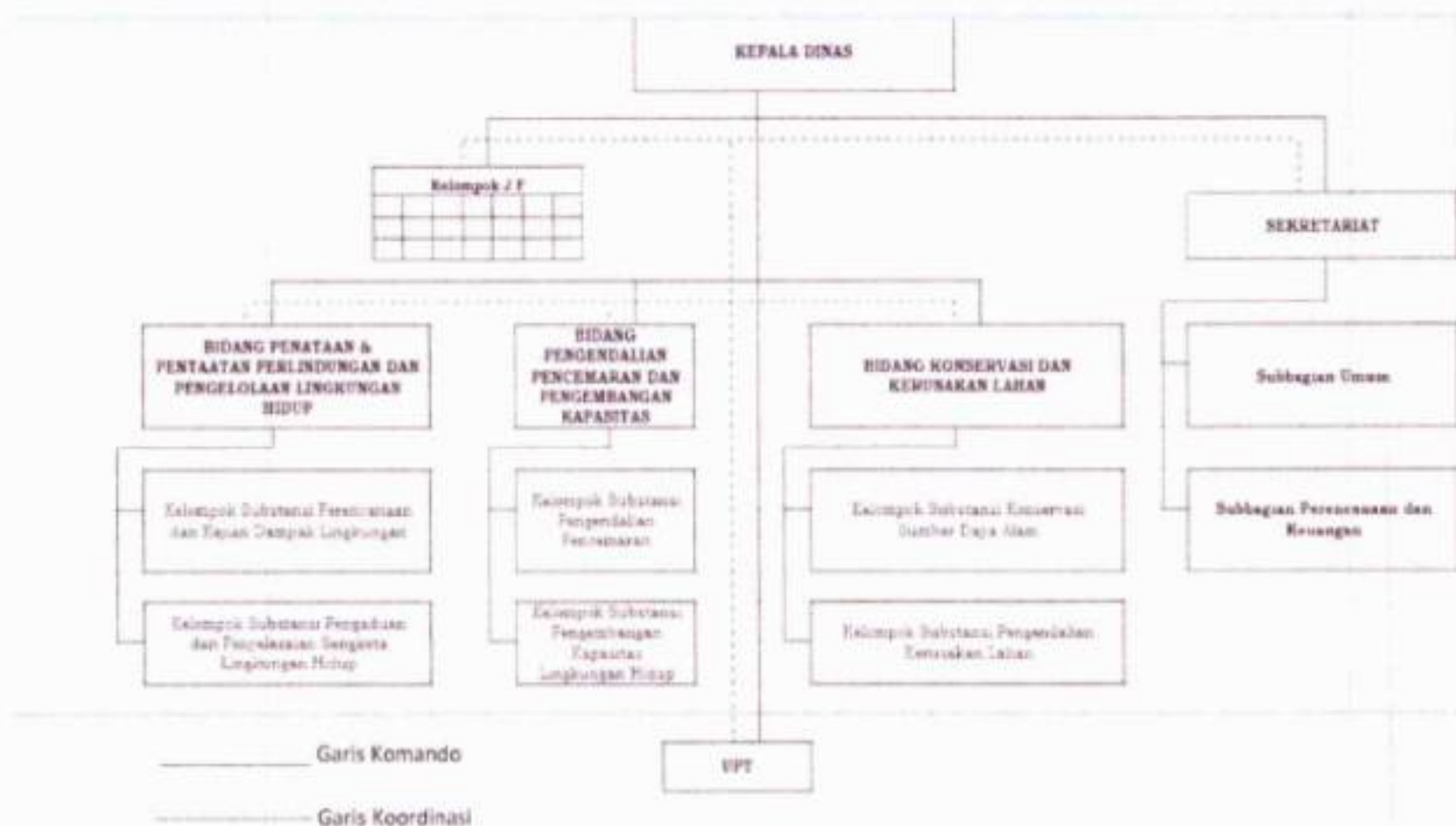
- a. perumusan kebijakan umum di bidang lingkungan hidup;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang lingkungan hidup;
- d. pengelolaan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- e. penataan dan pentaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. pengendalian pencemaran dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup;
- g. konservasi dan pengendalian kerusakan lahan;
- h. pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan hidup;
- i. penyelenggaraan sistem pengendalian interndi bidang lingkungan hidup;
- j. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasionaldi bidang lingkungan hidup;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang lingkungan hidup; dan
- l. pengelolaan UPT.

Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum, dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas;
- e. Bidang Konservasi dan Kerusakan Lahan;
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:



Setiap bagian dalam struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sendiri-sendiri.

1. Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
- b. pengoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran Dinas;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas Unit Organisasi di lingkungan Dinas;
- e. penyusunan rencana kerja sama;
- f. penyusunan perjanjian kinerja Dinas;
- g. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;

- h. pelaksanaan analisis dan penyajian data di bidang lingkungan hidup;
- i. penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang lingkungan hidup;
- j. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;
- k. penyusunan laporan kinerja Dinas;
- l. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas;
- m. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern Dinas;
- n. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- o. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Dinas;
- p. penyiapan bahan dan penatausahaan bidang lingkungan hidup;
- q. pengelolaan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;
- r. pelayanan administratif dan fungsional;
- s. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas;
- t. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Sekretariat;
- u. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan; dan
- v. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

Subbagian-subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas:

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum;
- b. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Umum;
- c. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang undangan;
- d. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- e. pelaksanaan pengendalian intern Dinas;
- f. penyusunan rincian tugas Dinas;
- g. pengelolaan urusan rumah tangga;
- h. pengelolaan barang milik Daerah;

- i. pengelolaan perpustakaan Dinas;
- j. pelaksanaan hubungan masyarakat;
- k. penyusunan rencana kerja sama;
- l. pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik Dinas;
- m. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
- n. pengelolaan perjalanan Dinas;
- o. pelaksanaan analisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai;
- p. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
- q. pelaksanaan pengembangan pegawai;
- r. penyelenggaraan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- s. pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- t. penyiapan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
- u. pelaksanaan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;
- v. penyiapan bahan evaluasi kinerja pegawai;
- w. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Subbagian Umum;
- x. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Subbagian Umum;
- y. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi umum; dan
- z. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum.

(2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang perencanaan dan keuangan;
- c. penyusunan rancangan kebijakan umum Dinas;
- d. pelaksanaan analisis dan penyajian data;
- e. pengelolaan sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan di bidang lingkungan hidup;
- f. penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran Dinas;
- g. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- i. penyiapan bahan pengendalian kegiatan Dinas;
- j. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;

- k. pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan Dinas;
- l. penyusunan laporan keuangan;
- m. pengelolaan administrasi pendapatan;
- n. penyiapan bahan perhitungan anggaran Dinas;
- o. penyusunan laporan kinerja Dinas;
- p. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- q. penyelenggaraan sistem Perencanaan dan Keuangan; pengendalian intern Subbagian
- r. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan dan keuangan; dan
- s. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

1. Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penataan dan pentaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penataan dan pentaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penataan dan pentaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan penataan dan pentaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan tugas bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, meliputi:
 - 1. penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - 2. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - 3. penyediaan data dan informasi berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - 4. penyusunan status lingkungan hidup Daerah;
 - 5. pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan

tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

6. penyusunan kajian lingkungan hidup strategis;
 7. pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
 8. pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis;
 9. pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis;
 10. pelaksanaan pengumuman permohonan penilaian dokumen analisa mengenai dampak lingkungan, permohonan pemeriksaan upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, dan pengumuman permohonan izin lingkungan serta pengumuman izin lingkungan;
 11. pelaksanaan penilaian dokumen analisa mengenai dampak lingkungan;
 12. pelaksanaan pemeriksaan dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan/atau upaya pemantauan lingkungan;
 13. penyiapan surat keputusan kelayakan lingkungan; dan
 14. penyiapan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan dan/atau upaya pemantauan lingkungan serta penerbitan izin lingkungan;
- f. pelaksanaan tugas bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, meliputi:
- 1) pelaksanaan pengelolaan pengaduan;
 - 2) pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - 3) penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - 4) pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - 5) pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan; dan
 - 6) pelaksanaan pengawasan penerbitan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- h. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- i. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penataan dan pentaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pencemaran dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan pengembangan kapasitas;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang pengendalian pencemaran dan pengembangan kapasitas;
- d. pelaksanaan pengendalian pencemaran dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan tugas bidang pengendalian pencemaran, meliputi:
 - 1) pelaksanaan pemantauan sumber pencemaran;
 - 2) pelaksanaan penanggulangan pencemaran;
 - 3) pelaksanaan pemulihan pencemaran;
 - 4) pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemaran;
 - 5) pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah, pesisir, dan laut;
 - 6) penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
 - 7) pelaksanaan perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - 8) pelaksanaan pembinaan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
 - 9) pelaksanaan pengawasan pemrosesan akhir sampah; dan
 - 10) pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- f. pelaksanaan tugas bidang pengembangan kapasitas lingkungan hidup, meliputi:
 - 1) pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup; dan
 - 2) pelaksanaan penilaian penghargaan lingkungan hidup;
- g. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas;
- h. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas;
- i. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengendalian pencemaran dan pengembangan kapasitas; dan

- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas.

3. Bidang Konservasi dan Kerusakan Lahan

Bidang Konservasi dan Kerusakan Lahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Konservasi dan Kerusakan Lahan mempunyai tugas melaksanakan konservasi dan pengendalian kerusakan lahan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Konservasi dan Kerusakan Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Konservasi dan Kerusakan Lahan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang konservasi dan pengendalian kerusakan lahan;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lahan;
- d. pelaksanaan konservasi dan pengendalian kerusakan lahan;
- e. pelaksanaan tugas bidang konservasi sumber daya alam, meliputi:
 - 1) pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
 - 2) penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 3) penyusunan valuasi ekonomi lingkungan hidup;
 - 4) pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - 5) pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - 6) pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
 - 7) pelaksanaan pengembangan ruang terbuka hijau;
- f. pelaksanaan tugas bidang pengendalian kerusakan lahan, meliputi:
 - 1) pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kerusakan lahan; dan
 - 2) pelaksanaan penanggulangan kegiatan perusakan lahan;
- g. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lahan;
- h. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lahan;
- i. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang konservasi dan pengendalian kerusakan lahan; dan
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Konservasi dan Kerusakan Lahan.

2.1.2 SUMBER DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai sumber daya sebagai berikut :

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 sebanyak 187 orang yang terdiri dari ASN dan THL, sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Distribusi Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
	Kepala Sub Bagian Umum	1
	Staf Sub Bagian Umum	4 + (2
	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan keuangan	THL)
	Staf Subbag Perencanaan dan keuangan	1
		1 + (2
		THL)
3	Kepala Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan LH.	1
	Ketua Tim Kerja Seksi Perencanaan dan Penyelesaian Sengketa LH	1
	Staf Seksi Perencanaan dan Penyelesaian Sengketa LH	1 + (1
	Ketua Tim Kerja Seksi Pengaduan dan penyelesaian Sengketa LH.	THL)
	Staf seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa LH.	1
		1
4	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas	1
	Ketua Tim Kerja seksi Pengendalian Pencemaran	1
	Staf Seksi Pengendalian pencemaran	1
	Ketua Tim Kerja seksi Pengembangan Kapasitas LH	1
	Staf Seksi Pengembangan Kapasitas LH	1
5	Kepala Bidang Konservasi dan Kerusakan Lahan	1
	Ketua Tim Kerja Seksi Konservasi Sumber Daya Alam	1
	Staf Seksi Konservasi Sumber Daya Alam	1
	Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lahan	-
	Staf seksi Pengendalian Kerusakan Lahan	2
6	Kepala UPT Kebersihan dan Pertamanan	1
	Kepala SubBagian Tata usaha UPT	1
	Staf UPT	9 + (143)
		THL)

6

7	Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Staf UPT	1 1 (2 THL)
	Jumlah	37 ASN + 150 THL

Berdasarkan kualifikasi jabatan, pendidikan dan gender secara terperinci dapat dilihat pada table 2.2 berikut:

Tabel 2.2.
Data SDM Berdasarkan Kualifikasi Jabatan, Pendidikan, dan Jenis Kelamin

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Desember 2024

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada						Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				L	P	
1	2	3	4				5	6					7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA	SMP-SD		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	v	v			1		1				1	
B.	Jabatan Administrasi													
	1. Administrator	4	v	v			4	3	1				2	2
	2. Pengawas	6		v			6	1	5				4	2
	3. Pelaksana	265		v	v		170		9	6	107	48	153	17
C.	Jabatan Fungsional	74	v	v	v		6	3	3				2	4
	Jumlah	350					187	7	19	6	107	48	162	25

Berdasarkan data pada tabel , tingkat pendidikan SDM Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul relatif sedang dan lebih didominasi laki-laki dibanding perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 107 orang (57%) , disusul oleh jenjang pendidikan SMP-SD sebanyak 48 orang (26%), S1 sebanyak 19 orang (10%), S2 sebanyak 7 orang (4%) dan D3 sebanyak 6 orang (3%).

9

Berdasarkan Jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki sebanyak 162 orang, lebih banyak dibanding jumlah pegawai perempuan yang hanya sebanyak 25 orang. Hal ini disebabkan karena pada posisi pelaksana jenis pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan fisik yang kebanyakan dilakukan oleh petugas laki-laki. Sedangkan pada posisi pejabat struktural maupun fungsional jumlah pegawai laki-laki dan perempuan terdapat keseimbangan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 163 orang, terdiri dari 95 orang pelaksana dan 68 jabatan fungsional. Terdapat unit kerja eselon IV yakni Subbagian Perencanaan dan Keuangan, subbagian umum, Kepala UPT Laboratorium, Kepala Subbagian TU UPT Lab, Kepala UPT KP dan Kepala Subbagian TU UPT KP.

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang tersedia saat ini di Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 seperti tersaji dalam tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Inventaris Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2024

No	Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Nama Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
1	1	3			ASET TETAP	6.397	67.804.379.294,43
			1		TANAH	16	5.698.728.778,00
			1	1	TANAH	16	5.698.728.778,00
			2		PERALATAN DAN MESIN	2.596	19.286.158.409,83
			2	1	ALAT BESAR	37	8.298.463.426,00
			2	2	ALAT ANGKUTAN	139	6.070.436.397,33
			2	3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	58	21.145.650,00
			2	4	ALAT PERTANIAN	671	597.201.548,00
			2	5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	554	896.764.574,50
			2	6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	19	157.084.080,00
			2	7	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	6	407.550,00
			2	8	ALAT LABORATORIUM	1.046	2.773.208.277,00



No	Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Nama Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
			2	9	ALAT PERSENJATAAN	2	300.000,00
			2	10	KOMPUTER	61	445.162.407,00
			2	11	ALAT EKSPLORASI	1	17.815.500,00
			2	12	ALAT PENGEBORAN	0	0
			2	13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0	0
			2	14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0	0
			2	15	ALAT KESELAMATAN KERJA	1	669.000,00
			2	16	ALAT PERAGA	0	0
			2	17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0
			2	18	RAMBU - RAMBU	0	0
			2	19	PERALATAN OLAH RAGA	1	7.500.000,00
			3		GEDUNG DAN BANGUNAN	328	25.583.110.101,34
			3	1	BANGUNAN GEDUNG	321	23.189.734.904,30
			3	2	MONUMEN	1	8.500.000,00
			3	3	BANGUNAN MENARA	0	0
			3	4	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	6	2.384.875.197,04
			4		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	146	15.871.278.497,26
			4	1	JALAN DAN JEMBATAN	1	215.959.300,00
			4	2	BANGUNAN AIR	84	3.140.885.077,26
			4	3	INSTALASI	54	7.442.305.600,00
			4	4	JARINGAN	7	5.072.128.520,00
			5		ASET TETAP LAINNYA	3.309	1.195.639.508,00
			5	1	BAHAN PERPUSTAKAAN	0	0
			5	2	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYA AN/OLAHRAGA	0	0

No	Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Nama Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
			5	3	HEWAN	0	0
			5	4	BIOTA PERAIRAN	0	0
			5	5	TANAMAN	3.309	1.195.639.508,00
			5	6	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0	0
			5	7	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0	0
			6		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	2	169.464.000,00
			6	1	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	2	169.464.000,00
			7		AKUMULASI PENYUSUTAN	0	0
			7	1	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	0	0
			7	2	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	0	0
			7	3	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	0	0
			7	4	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	0	0
2	1	5			ASET LAINNYA	554	4.256.148.458,70
			2		KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0
			2	1	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0
			3		ASET TIDAK BERWUJUD	35	3.285.562.630,00
			3	1	ASET TIDAK BERWUJUD	35	3.285.562.630,00
			4		ASET LAIN-LAIN	519	970.585.828,70
			4	1	ASET LAIN-LAIN	519	970.585.828,70
			5		AKUMULASI AMORTISASI ASET	0	0

No	Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Nama Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
					TIDAK BERWUJUD		
			5	1	AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	0	0
			6		AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA	0	0
			6	1	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA	0	0
					TOTAL	6.951	72.060.527.753,13

Sumber : Data Laporan Aset tahun 2024

2.1.3 KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup, berpedoman pada indikator kinerja khususnya yang sesuai dengan pengukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Pada Renstra periode tahun 2021 – 2026 Dinas Lingkungan Hidup didukung tiga indikator kinerja utama. Adapun sasaran dan indikator kinerja utama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup dengan indikator sasaran nilai peningkatan tata kelola lingkungan hidup;
2. Terwujudnya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator sasaran persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD dengan indikator sasaran nilai AKIP PD yaitu:

Adapun capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup tergambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup	NA	34,60	38,35	46,25	54,15	62,05	NA	74,88	80,61	95,26	-	NA	216,42%	228,03%	205,97%	-
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	74,53	80,05	80,07	80,09	80,11	80,13	NA	80,15	81,04	82,32	-	NA	100,12%	101,21%	102,78%	-
3	Terwujudnya Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	43	50	54	58	61	65	NA	100	57,05	58,32	-	NA	200,00%	105,65%	100,55%	-

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 mengalami kenaikan secara target. Secara realisasi, dari data hasil capaian tersebut dapat dilihat bahwa secara umum pencapaian kinerja menunjukkan hasil yang memuaskan dengan selalu tercapai atau melampauinya target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Dilihat dari sisi alokasi anggaran, target dan realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup dari tahun 2021 - 2025 tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Gunungkidul

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pembayaran	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Program Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Tata Ruang		3.250.757.600	5.237.300.000	5.702.346.200	6.525.07.3.000	0	3.250.757.600	4.362.283.160	5.372.332.288	0	0,00	100,00	83,29	94,21		1.631.298.290	1.790.777.420
Pemeliharaan Ruang Sempit Ruang Strategis Pantai Selatan			5.237.300.000	5.702.346.200				4.362.283.160	5.042.831.708				83,29	93,87		2.695.173.100	680.548.548
Pemeliharaan Ruang Sempit Strategis Pantai Gunung Kidul		3.250.757.600		3.300.000.000	6.525.07.3.000		3.250.757.600		3.290.800.380		0,00	100,00	0,00	99,85		1.091.438.467	1.450.617.519
Program Penunjang Usaha Pemukiman Daerah Kabupaten/Kota	4.951.493.204	4.997.242.737	3.450.896.524	3.721.079.712	3.957.041.917	4.304.510.275	4.483.859.401	3.346.314.010	3.530.099.269	0	86,90	89,73	95,78	94,87	0,00	249.112.847	258.137.002
Penyusunan Dokumen Pemantauan Perumahan Daerah	6.000.000	5.720.000	11.200.000	7.910.000	16.685.000	6.000.000	5.720.000	11.081.200.00	7.793.660	-	100,0	100,00	98,96	98,53	-	2.671.250	347.887
Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA S&PD	500.000	600.000	1.500.000	300.000	2.000.000	500.000	600.000	1.500.000	300.000	-	100,0	100,00	100,0	100,00	-	387.500	-66.667
Kordinasi dan Penyusunan	500.000	600.000	1.500.000	300.000	2.000.000	500.000	600.000	1.500.000	300.000	-	100,0	100,00	100,0	100,00	-	373.000	-66.667

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Dokumen Perubahan RKA-SKPD					0			00			0		0				
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	750.000	1.200.000	3.000.000	900.000	3.240.000	750.000	1.200.000	3.000.000	900.000		100,0	100,00	100,0	100,00		622.500	50.000
					0			00			0		0				
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	650.000	600.000	2.000.000	600.000	2.000.000	650.000	600.000	2.000.000	600.000		100,0	100,00	100,0	100,00		337.500	-16.667
					0			00			0		0				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD			26.152.500	28.382.500	32.940.000			26.045.000	27.692.500							3.393.750	1.647.500
			0	0	00			000	00								
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.480.000	25.835.000	1.500.000	600.000	1.950.000	24.480.000	25.835.000	1.500.000	600.000		100,0	100,00	100,0	100,00		-	-
	0	0			0	00	00	00			0		0			5.632.500	7.960.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.531.476,304	4.457.813,537	2.685.549,724	2.824.132,842	2.957.650,337	3.929.040,397	3.967.799,992	2.583.363,084	2.693.764,136		86,71	89,01	96,19	95,38		393.436,492	411.760,420
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	1.200.000	1.500.000	1.100.000	2.600.000	2.000.000	1.200.000	1.500.000	1.100.000		100,0	100,00	100,0	100,00		150.000	-300.000
					0	0	0	00	0		0		0				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26.195.000	26.595.000	30.730.000	32.927.500	36.415.000	22.795.000	26.595.000	30.622.500	31.113.950		87,82	100,00	90,55	94,49		2.555.000	2.772.983
	0	0	0	0	00	00	00	500	50								
Pendataan dan Pengolahan Administrasi	2.000.000	1.200.000	11.800.000	104.881.900	170.821.580	2.000.000	1.200.000	11.789.000	145.944.922		100,0	100,00	99,91	88,51		42.130.420	47.981.641
			0			0	0	000			0					0	1

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Batas-rata Penyerapan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Kepegawaian				00													
Pembelian dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		15.000.00 0	32.650.00 0	10.000.00 0	22.650.0 00		14.900.0 00	25.000 000	8.499.00 0		0,00	99,33	76,37	84,99		2.536.000	3.200.500
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000	1.000.000	2.345.000	4.620.000	4.620.00 0	1.000.00 0	1.000.00 0	2.345.0 00	4.620.00 0		100,0 0	100,00	100,0 0	100,00		905.000	1.206.667
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.922.00 0	98.743.00 0	80.316.00 0	29.614.00 0	99.827.0 00	39.072.0 00	97.046.0 00	80.066 000	28.939.0 00		97,87	98,34	99,69	97,72		14.976.25 0	3.377.667
Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	8.000.000	8.000.000	10.600.00 0	10.050.00 0	16.120.5 00	8.000.00 0	8.000.00 0	10.600 000	10.050.0 00		100,0 0	100,00	100,0 0	100,00		2.035.125	683.333
Penyediaan Bahan Baku dan Persaran Perundang-undangan	1.200.000	1.350.000	0	-	0	1.200.00 0	1.350.00 0	0	0		100,0 0	100,00	0,00	0,00		150.000	150.000
Penelitian Kurungan Tama			8.400.000	3.200.000	7.000.00 0			8.320.9 85	2.880.90 0		0,00	0,00	99,06	82,31		-700.000	5.440.080
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.700.00 0	72.299.20 0	123.962.0 00	173.171.0 00	188.869 000	35.741.6 34	68.807.3 99	100.35 8.973	152.483 064		69,13	93,17	81,12	88,05		34.292.25 0	34.913.97 8
Pengadaan Mebel		14.400.00 0	87.330.00 0	0	15.288.0 00		14.400.0 00	85.945 250			0,00	100,00	99,56	0,00		9.304.000	72.545.25 0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Listrik		6.387.000	21.143.00 0	29.750.00 0	1.400.00 0		7.895.00 0	19.745 500	29.500.0 00		0,00	94,13	93,38	94,16		-	10.802.50 0

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.020.00 0	38.150.00 0	46.080.00 0	47.495.00 0	54.270.0 00	35.572.0 00	37.987.4 00	45.347. 000	45.552.5 00		98,76	99,57	98,41	95,91		4.562.000	3.326.833
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	59.400.00 0	59.850.00 0	59.878.50 0	65.490.72 0	55.110.0 00	35.345.9 09	42.526.1 33	48.735. 432	52.435.0 85		59,50	71,05	81,39	80,07		1.072.500	5.696.725
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	77.000.00 0	75.000.00 0	90.056.40 0	90.525.00 0	117.000. 000	76.780.4 00	74.849.5 00	90.048. 306	90.413.0 00		99,71	99,80	99,99	99,88		10.000.00 0	4.544.200
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Pertinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.200.00 0	67.700.00 0	101.087.9 00	97.500.00 0	95.700.0 00	62.578.4 35	67.695.0 77	101.08 7.900	97.500.0 00		97,47	99,99	100,0 0	100,00		7.875.000	11.640.32 2
Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	10.500.00 0	10.000.00 0	16.300.00 0	12.300.00 0	14.500.0 00	10.499.5 00	10.000.0 00	16.300. 000	12.300.0 00		100,0 0	100,00	100,0 0	100,00		1.000.000	600.167
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	3.000.000	31.913.00 0	78.819.28 0	30.635.4 00	6.000.00 0	2.000.00 0	31.910. 880	78.816.0 48		100,0 0	100,00	99,99	100,00		6.158.850	24.272.01 6
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000	3.000.000	5.400.000	5.000.000	5.000.00 0	3.000.00 0	3.000.00 0	5.400.0 00	5.000.00 0		100,0 0	100,00	100,0 0	100,00		750.000	1.000.000
Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.00 0	999.900 0	0	0		100,0 0	99,99	0,00	0,00		0	-100

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Ratio-ratio Perbandingan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Laksmi																	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	6.030.000	274.040,0 00	409.397,3 00	333.447,5 00	44.295,0 00	6.030.000 0	253.440,0 415	405,18 2.030	333.266,0 000	0	100,0 0	92,49	98,92	99,05	0,00	6.346.250	108.072,0 00
Pemusatan dan Peningkatan RPPH Kabupaten/Kota		260.040,0 00	351.300,0 00	0	0		248.440,0 415	347,42 3.030	0	0						82.660,00 0	98.982,43 5
Pengelolaan Pelaksanaan RPPH Kabupaten/Kota	6.030.000	5.000.000	57.497,50 0	31.997,50 0	44.295,0 00	6.030.000 0	5.000.000 0	57.759,00 000	30.957,5 00	0	100,0 0	100,00	99,79	96,75	0,00	6.346.250	8.302.500
Peningkatan RPPH Kabupaten/Kota				301.400,0 (0)	0				296.308,000 (0)	0	0,00	0,00	0,00	99,29	0,00		
PROGRAM PENJELAJAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	331.130,0 00	977.880,0 00	734.144,8 00	944.796,0 00	845.531,0 000	321.004,0 000	905.563,0 100	747,07 4.740	930.584,000 806	0	96,94	92,60	99,08	98,80	0,00	128.600,2 00	233.193,4 42
Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Lingkungan Hidup Diskusikan terhadap Media Tumbuh Air Ulin dan Laut	84.200,00 0	128.320,0 00	517.544,0 00	270.660,0 00	194.675,0 000	82.200,0 00	125.170,0 200	513,39 7.305	262.885,000 220		97,62	97,55	99,20	97,13	0,00	27.618,75 0	60.228,40 7
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		639.560,0 00	221.970,8 00	570.161,0 00	966.636,0 000		770.392,0 000	218,97 2.435	564.173,000 936		909,0 0	91,76	98,68	98,95	0,00	270.267,3 33	103.109,4 82

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Pemberian Informasi Peringatan Peringatan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	246.930.000,00	10.000.000	14.730.000	103.075.000	44.200.000	238.804.480	10.000.000	14.705.000	103.525.650	0	96,71	100,00	99,83	99,37	0,00	-	-
																40.642,30	45.042,94
																0	3
PROGRAM PENGELOLAAN KEANDALAN HAYATI (KEHATI)	1.349.756.000	3.453.535.100	2.627.672.373	2.212.325.444	3.536.199.645	1.247.110.023	3.016.373.710	2.443.390.626	2.163.330.571	0	92,40	87,34	94,51	97,78	0,00	546.810,4	305.465,2
																11	29
Pengelolaan Taman Satekaragman Hayati di Luar Kawasan Rukun	186.700.000	350.000.000	156.130.000	200.000.000	105.630.000	186.600.000	340.935.744	155.683.700	199.600.000		99,95	97,41	99,70	99,80	0,00	-	3.666,667
																20.762,50	0
Pengelolaan Kebun Raya	68.293.000	10.000.000	142.067.500	255.589.000	17.096.000	68.251.000	9.505.000	138.800	254.010.500		99,94	99,55	97,70	99,46	0,00	-	61.919,83
																12.799,75	3
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.082.311.000	3.078.535.100	2.299.099.875	1.733.192.444	3.399.423.645	980.008.023	2.630.482.986	2.158.561.836	1.645.977.211		90,33	80,10	93,89	97,28	0,00	516.728,1	235.322,7
																61	29
Pengelolaan Taman Satekaragman Hayati Lainnya	6	15.000.000	30.355.000	23.940.000	24.036.000		15.000.000	30.339.250	23.918.000		0,00	100,00	99,95	99,91	0,00	3.010.000	12.128,62
																3	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Satekaragman Hayati	10.250.000	0	0	0	0	10.250.000	0	0	0		100,0	0,00	0,00	0,00			

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Bekas antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Bekas-rata Perencanaan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP SIZ LINGKUNGAN DAN SIZ PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	81.785,00 0	168.730,0 00	72.940,00 0	28.068,00 0	43.950,0 00	81.275,0 00	166.076 800	71.154 700	27.995,9 00	0	99,38	98,43	98,01	99,74	0,00	- 9.458.730	- 17.798,70 0
Fasilitasi Pemecahan Konflik dan Kesejahteraan lain Lingkungan dan/atau lain PPLH	41.195,00 0	123.980,0 00	0		0	40.685,0 00	121.387 600	0			98,76	97,92	0,00	0,00		82.785,00 0	80.712,69 0
Pengembangan Kapabilitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup		5.000,000	0				5.000,00 0	0			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	
Pengawasan Umuk dan/atau Kegiatan yang lain Lingkungan Hidup lain PPLH yang Diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40.590,00 0	19.865,00 0	53.300,00 0	0		40.590,0 00	19.837,4 00	53.246 300			100,0 0	99,89	99,90	0,00	0,00	- 4.010.000	- 6.329,150
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Operasi dan Rencana PPLH		19.890,00 0	19.300,00 0	0			19.841,8 00	17.508 400			0,00	99,76	92,79	0,00	0,00	-390.000	- 1.933.400

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Perumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Pengawasan Peraturan Berusaha serta Penetapan Peraturan Pemerintah terkait Penetapan Lingkungan yang Diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				28.068.000	43.950.000				27.995.900		0,00	0,00	0,00	99,74	0,00	15.882.000	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	758.100.000	217.700.000	186.275.000	66.540.000	177.145.000	733.704.300	217.235.750	153.516.600	66.422.000	0	96,78	99,79	96,23	99,82	0,00	145.238.780	222.427.433
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	19.300.000	0	40.550.000			18.600.000	0	40.643.600			95,38	0,00	99,98	0,00	0,00	10.575.000	11.021.825
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	738.600.000	193.700.000	74.700.000	27.150.000	49.925.000	715.104.300	193.225.750	74.652.750	27.127.000		96,82	99,76	99,94	99,92	0,00	705.756.250	229.325.767
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye		24.000.000	40.925.000	16.740.000	16.100.000		24.000.000	38.220.200	16.577.000		0,00	100,00	93,39	99,62	0,00	17.330.000	5.509.000

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Bersis antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rasio-rasio Pencapaian	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Lingkungan Hidup																	
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Dana Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/ Kelompok Masyarakat				22.650,00 0	108.120, 000				22.618,0 00		0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	83.470,00 0	
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MAHABAKAT	60.930,00 0	10.000,00 0	69.600,00 0	0	145.160, 000	41.030,0 00	10.000,0 00	69.555, 350	0	0	67,34	100,00	99,94	0,00	0,00	21.087,50 0	14.262,67 5
Pendukung Riset Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan Fibersopi dalam Perencanaan dan Pengelolan Lingkungan Hidup	60.930,00 0	10.000,00 0	69.600,00 0	0	145.160, 000	41.030,0 00	10.000,0 00	69.555, 350	0		67,34	100,00	99,94	0,00	0,00	21.087,50 0	14.262,67 5
PROGRAM PERANGKASAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	5.100.000	4.930.000	4.810.000	3.238.000	6.629,80 0	3.070,00 0	4.930,00 0	4.796,0 00	3.228,00 0	0	99,41	100,00	99,71	99,69	0,00	382.450	614.000
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	5.100.000	4.930.000	4.810.000	0	0	3.070,00 0	4.930,00 0	4.796,0 00			99,41	100,00	99,71	0,00	0,00	143.000	127.000

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Basis antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Penambahan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Pengelolaan Pengelolaan Perencanaan dan Perusakan Lingkungan Hidup lingkungan Kabupaten/Kota				3.238.000	6.629.800				3.238.000		0,00	0,00	0,00	99,49	0,00	3.791.800	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPUHAN	4.667.660,000	5.053.550,000	3.056.808,700	4.990.324,300	6.117.800,041	4.533.136,760	4.963.219,679	5.010,75.303	4.918.266,373	0	97,12	98,25	99,04	98,46	0,00	362.547,510	128.405,469
Penanganan Sampah dengan Melakukan: Pemilahan: Pengumpulan: Pengangkutan: Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/TPA Kabupaten/Kota	4.339.660,000	4.280.550,000	4.837.958,700		0	4.205.886,760	4.202,447.339	4.811,362.803	0		96,92	97,97	99,04	0,00	0,00	254.149,350	302.741,819
Peningkatan Petani Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Pencampuran	328.000,00,00	256.000,00,00	194.500,00,00	35.000,00,00	280.655,000	327,276,000	255,098,340	194,448,500	34.450,00,00		99,78	99,65	99,97	98,43	0,00	221.586,250	97.608,667
Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional				4.860.324,500	5.787,193.041				4.784,103.373		0,00	0,00	0,00	98,43	0,00	926.870,741	

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Persentase	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Pengadaan Survei dan Pengukuran Penghijauan Persempitan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		508.000,00		0	0		507.674,000	0			0,00	99,94	0,00	0,00	0,00		
Pengukuran dan Pelaksanaan Perolehan Gizi Penghijauan Sampah			4.350.000	100.000,00	50.000,00			4.264,000	99.833,000		0,00	0,00	98,02	99,83	0,00	22.825,000	95.569,000
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	120.000,00	0	0	0	0	119.900,000	0	0	0	0	99,92	0,00	0,00	0,00		0	0
Pemeliharaan Ekowisata dan Perhutanan Kawasan sekitar Kawasan Penghijauan TAHURA Kabupaten/Kota	120.000,00	0	0	0	0	119.900,000,00	0	0	0	0	99,92	0,00	0,00	0,00		0	0
	12.334,004.304	18.459,363.437	17.882,744.899	18.007,320.186	21.398,975.403	11.392,810.843	17.273,454.765	16.603,342.539	17.342,820.347	0	92,37	93,83	93,13	96,31		2.366,342.775	1.983,336.301

Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah anggaran Dinas Lingkungan Hidup bervariasi jumlahnya dari tahun ke tahun, menyesuaikan kebutuhan di setiap tahun anggarannya. Penyerapan anggaran dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan dan selalu mencapai persentase di atas 90%. Penyerapan anggaran tertinggi di tahun 2024 sebesar 96,31% dan terendah di tahun 2021 sebesar 92,37%.

2.1.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Berdasarkan tugas, pokok dan fungsi, Dinas Lingkungan Hidup memiliki beberapa kelompok sasaran layanan, antara lain :

1. Masyarakat Umum

Dinas Lingkungan Hidup memberikan layanan kepada masyarakat yang tinggal di seluruh kapanewon yang ada di wilayah kabupaten/kota, berupa layanan pengelolaan lingkungan yang sehat dan lestari. Kualitas udara, air dan pengelolaan sampah dan pengelolaan ruang terbuka hijau yang baik akan mempengaruhi kesehatan, kenyamanan dan kualitas hidup.

Masyarakat umum ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti ikut dalam sosialisasi yang diadakan Dinas Lingkungan Hidup, ikut menjaga kebersihan lingkungan, melakukan penanaman pohon untuk penghijauan dan juga ikut berperan dalam penyampaian informasi terkait adanya pelanggaran atau permasalahan lingkungan yang perlu ditangani.

2. Pengusaha/Pelaku Usaha

Kegiatan usaha dan industri memiliki potensi dampak signifikan terhadap lingkungan, baik melalui limbah, emisi maupun penggunaan sumber daya alam. Oleh karena itu perlu adanya pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan dan mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab, yang mempunyai izin kegiatan usaha.

Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk memenuhi persyaratan perizinan lingkungan dan melaksanakan kewajiban terkait pengelolaan lingkungan, serta menggunakan teknologi dan praktik produksi yang ramah lingkungan.

3. Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait

Dinas Lingkungan Hidup memberikan layanan kepada dinas instansi lain dalam pengelolaan lingkungan seperti layanan pengambilan sampah dan pengelolaan RTH publik.

2.1.5. MITRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dalam hal pemberian pelayanan terbaik sesuai tugas, pokok dan fungsi, Dinas Lingkungan Hidup menggandeng mitra dengan pihak lain antara lain :

1. Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait lainnya
Dinas Lingkungan Hidup perlu berkolaborasi dan bersinergi dengan dinas lain di pemerintah daerah dan juga tingkat pemerintah yang lebih tinggi (propinsi maupun pusat) terkait efektivitas kebijakan dan pengelolaan lingkungan. Kolaborasi tersebut bisa dilakukan antara lain dengan harmonisasi perencanaan dan pelaksanaan program terkait pengelolaan lingkungan, berbagi data dan informasi lingkungan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik serta mengembangkan dan melaksanakan program lingkungan secara terpadu.
2. Lembaga Pendidikan dan Akademisi
Lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang peduli lingkungan melalui pendidikan dan penelitian. Kemitraan dengan akademisi dapat menghasilkan inovasi dan solusi berbasis ilmu pengetahuan untuk mengatasi permasalahan lingkungan.
3. Kelompok Peduli Lingkungan
Kelompok peduli lingkungan memiliki peran penting sebagai mitra kritis pemerintah dalam isu lingkungan. Mereka seringkali memiliki pemahaman mendalam tentang isu-isu lokal dan mampu memobilisasi masyarakat untuk aksi lingkungan.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.2.1 PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang lingkungan hidup. Dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup, tentu banyak permasalahan yang dihadapi sebagai bagian dari sebuah tantangan yang perlu dicarikan alternatif solusinya. Identifikasi peta permasalahan pada Dinas Lingkungan Hidup kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini:

Tabel 2.6
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengurangan dan penanganan sampah belum optimal	Jumlah SDM dan sarana prasarana pengelolaan sampah masih kurang	Kesadaran masyarakat untuk mengurangi sampah dan memilah sampah dari sumbernya masih rendah
2	Pencemaran air, udara, tanah dan LB3 yang semakin meningkat	Kegiatan pembangunan fisik, industri, rumah tangga, dan transportasi semakin meningkat	Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha/industri dalam pengelolaan lingkungan hidup
3	Timbulnya dampak negatif akibat Usaha/Kegiatan	Tingkat ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup masih rendah	Meningkatnya pertumbuhan kegiatan usaha/industri
4	Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup	Tingginya kerusakan dan menurunnya kualitas lingkungan,	Meningkatnya eksploitasi sumber daya alam yang tidak mengindahkan kemampuan serta daya dukung lingkungan
5	Rendahnya Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat semakin kompleksnya permasalahan sosial yang timbul di masyarakat	Budaya tingkah laku masyarakat yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungannya
6	Belum terwujudnya kota yang berwawasan lingkungan	Masih rendahnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik yang bersifat public maupun privat	• Keterbatasan tersedianya lahan publik untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) • Peningkatan luas lahan terbangun
7	Belum teridentifikasinya keanekaragaman Hayati	Tidak terkelolanya keanekaragaman hayati	Terancam punahnya keanekaragaman hayati

2.2.2 ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah masalah atau kondisi penting yang perlu diperhatikan dan diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan daerah karena memiliki dampak signifikan terhadap daerah tersebut. Karakteristik dari isu strategis yaitu mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan pembangunan daerah. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang bisa menjadi masalah maupun peluang bagi suatu daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis dirumuskan berdasarkan pada permasalahan perangkat daerah, termasuk di dalamnya telaah tentang Norma Standar, Prosedur dan

Kriteria (NSPK) yang ada dan berlaku. Di samping itu, dalam menentukan perumusan isu strategis perangkat daerah perlu juga melihat Isu KLHS kondisi lingkungan dinamis (isu global, nasional, maupun regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.2.2.1 Telaah Dokumen Perencanaan

A. Global Megatrend

Megatrend dapat diartikan sebagai transformasi global dalam periode jangka panjang yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Transformasi global ini terdiri dari 10 komponen, yaitu:

1. Demografi global
Adanya tren demografi global akan mendorong peningkatan urbanisasi, arus imigrasi, dan penduduk usia lanjut. Jika dikaitkan dengan persebaran usia penduduk maka pada negara maju terjadi persaingan antara populasi penduduk usia produktif dan penduduk lanjut usia yang menjadi hambatan dalam hal pendapatan pajak. Adapun pada negara berkembang, proporsi penduduk usia produktif diprediksi akan lebih dominan sehingga memunculkan tuntutan dalam hal pendidikan, ketersediaan lapangan pekerjaan, dan sumber daya. Hal ini agar peluang tingginya jumlah penduduk usia dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga tidak menimbulkan peningkatan pengangguran yang menjadi beban pada aspek kependudukan.
2. Urbanisasi dunia
Pembangunan perkotaan akan berperan dalam meningkatkan daya saing, kualitas hidup masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjadi implikasi bahwa perlu adanya perencanaan perkotaan yang efektif dan berkelanjutan sehingga kawasan perkotaan menjadi layak huni dalam jangka waktu lama untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penduduk perkotaan yang meningkat.
3. Peranan *emerging economies*
Adanya investasi Sumber Daya Manusia dan infrastruktur serta reformasi struktural dan iklim usaha mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berdaya saing, dan berkesinambungan.
4. Perdagangan internasional
Poros perdagangan dan investasi dunia terletak di negara berkembang dengan pertumbuhan enam persen per tahun. Diprediksikan perdagangan intra Asia akan meningkat dan investasi asing langsung ke dan antar negara berkembang berlanjut.
5. Keuangan internasional
Terjadinya pergeseran dominasi mata uang dunia dari dolar AS menjadi *multi currencies*.
6. Kelas menengah
Jumlah middle dan upper income class akan terus meningkat, dengan Asia dan Amerika Latin sebagai negara dengan jumlah *middle* dan *upper income class* terbesar.

7. Persaingan sumber daya alam

Persaingan memperebutkan sumber daya alam akan meningkat seiring dengan peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika. Akan tetapi, diperkirakan ketersediaan sumber daya alam tidak dapat memenuhi kebutuhan permintaan yang semakin bertambah meskipun dengan adanya teknologi yang mampu meningkatkan efisiensi sumber daya alam. Kelangkaan sumber daya yang diiringi dengan peningkatan kebutuhan akan berdampak pada peningkatan harga komoditas sumber daya. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi untuk mengurangi penggunaan sumber daya, meningkatkan *reuse*, *recycle*, dan mencari alternatif sumber daya pengganti.

8. Teknologi

Tren perubahan teknologi ke depan akan didominasi oleh teknologi informasi dan komunikasi, bioteknologi dan rekayasa genetik, Kesehatan dan pengobatan, energi terbarukan, *wearable devices*, otomatisasi dan robotik serta *artificial intelligence*. Rockefeller Foundation and Global Business Network (RF and GBN, 2010) menjelaskan bahwa tantangan utama bukan hanya tentang pengembangan teknologi, melainkan juga berkaitan dengan penyediaan akses teknologi yang dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia seperti pada urusan pendidikan, kesehatan, energi, dan pengaturan terhadap teknologi yang berpotensi mengancam keamanan negara seperti terorisme global atau perdagangan ilegal.

9. Perubahan iklim

Seiring waktu, tantangan pemanasan global semakin meningkat, baik berupa kejadian ekstrim maupun perubahan iklim jangka Panjang. Perubahan iklim berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Jika tidak ada upaya untuk menurunkan emisi, maka rata-rata suhu global diprediksi meningkat 3 – 3,5 derajat celsius pada akhir abad ini. Pemanasan global berpotensi memicu bahaya perubahan iklim yang cepat dan parah, mengganggu *supply chains*, hingga menenggelamkan beberapa kota besar di seluruh dunia. Selain itu, keanekaragaman hayati akan terus berkurang dan mengancam kestabilan pasokan pangan dan sumber daya air. Upaya mengatasi perubahan iklim harus dilakukan oleh seluruh pihak, khususnya merubah gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Pemerintah sebagai salah satu pemangku kepentingan, dapat melakukan beberapa upaya, khususnya terhadap sektor industri yang menyumbang emisi besar seperti melalui penyusunan regulasi terkait perubahan iklim serta pemberian insentif dan disinsentif.

10. Perubahan Geopolitik

Perubahan geopolitik akan terus berlanjut di masa mendatang seiring dengan meningkatnya peranan Cina, kerentanan di Kawasan Timur Tengah serta meningkatnya kelas baru dan kelompok penentu.

Perkembangan Megatrend dan dampak yang ditimbulkan di masa mendatang, harus diperhatikan oleh para pemangku kepentingan. Namun demikian, pemahaman terhadap megatrend dapat berbeda, tergantung pada sudut pandang pemangku kepentingan ataupun masyarakat. Dari sepuluh komponen transformasi global tersebut, yang ada kaitannya dengan ketugasan Dinas Lingkungan Hidup adalah “Persaingan Sumber Daya Alam” dan “Perubahan Iklim”.

B. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menjadi agenda global 2030. Pembangunan global ini merupakan agenda pembangunan global baru periode 2016-2030 untuk meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium/*Millennium Development Goals* (MDGs) termasuk pencapaian tujuan-tujuan yang tidak tercapai, terutama menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. TPB/SDGs jauh lebih luas daripada MDGs yang akan meneruskan prioritas-prioritas pembangunan meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan tujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial dan lingkungan. TPB/SDGs juga menjanjikan masyarakat yang lebih damai dan inklusif. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, ditetapkan pula sarana pelaksanaan (*Means of Implementation*).

Keberhasilan pencapaian SDGs tidak dapat dilepaskan dari peran penting pemerintah daerah. Dinas Lingkungan hidup sebagai bagian dari pemerintah daerah juga mempunyai peran penting dalam pencapaian keberhasilan SDGs., terkait dalam pemberian layanan kualitas lingkungan yang baik.

C. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045

Berdasarkan Dokumen RPJPN 2025-2045, Visi Indonesia Emas 2045 adalah “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Visi tersebut dicerminkan dalam lima sasaran visi yang dicapai melalui delapan misi (agenda) pembangunan. Selanjutnya, delapan misi pembangunan dijabarkan ke dalam 17 (tujuh belas) arah pembangunan yang diukur keberhasilannya melalui 45 (empat puluh lima) indikator utama.

Untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan diwujudkan melalui delapan misi pembangunan yang terdiri dari tiga misi transformasi, dua landasan transformasi, dan tiga kerangka implementasi transformasi. Delapan misi tersebut yaitu:

1. Mewujudkan transformasi sosial
2. Mewujudkan transformasi ekonomi
3. Mewujudkan transformasi tata kelola
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi

6. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8. Keseimbangan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas melalui kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan yang efektif

Selanjutnya, arah pembangunan yang ditetapkan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan, sebagai berikut:

1. Kesehatan untuk semua
2. Pendidikan berkualitas yang merata
3. Perlindungan sosial yang adaptif
4. IPTEK, inovasi, dan produktivitas ekonomi
5. Penerapan ekonomi hijau
6. Transformasi digital
7. Integrasi ekonomi domestik dan global
8. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
9. Regulasi dan tata kelola yang berintegrasi dan adaptif
10. Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial
11. Stabilitas ekonomi makro
12. Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan
13. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju
14. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif
15. Lingkungan hidup berkualitas
16. Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan
17. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

Pembangunan nasional jangka panjang dibedakan ke dalam empat tahapan. Tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama yaitu tahap perkuatan fondasi transformasi.

D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

Berdasarkan dokumen rancangan RPJMN tahun 2025-2029, setidaknya terdapat tujuh isu strategis kewilayahan pada wilayah pulau Jawa-Bali, yaitu:

1. Masih tingginya kesenjangan pembangunan antarwilayah karena persebaran pusat ekonomi yang tidak meratas antara utara dan selatan, barat dan timur (Bali), serta daerah kepulauan.
2. Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti banjir rob di daerah pesisir utara Pulau Jawa, gempa bumi, dan tsunami di daerah pesisir selatan Pulau Jawa.
3. Degradasi lingkungan seperti penurunan muka tanah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan polusi udara akibat aktivitas industri.

4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengembangan sektor pertanian.
5. Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya mismatch antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri.
6. Belum optimalnya upaya menanggulangi kemiskinan dalam mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan jumlah penduduk miskin, serta scarring effect akibat pandemi COVID-19.

E. Telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

1. Renstra Kementerian Lingkungan Hidup

Tujuan Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2025 -2029 adalah untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai tujuan tersebut, peran utama kementerian Lingkungan Hidup tahun 2025 - 2029 adalah :

1. Menjadi pelopor implementasi ekonomi hijau
2. Memastikan kebijakan investasi pembangunan di Indonesia memenuhi prinsip keberlanjutan
3. Menghadapi tantangan kondisi kualitas lingkungan dan efek perubahan iklim
4. Menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dalam pembangunan
5. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam
6. Mengurangi limbah
7. Menjaga kualitas lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2025-2029

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.16/Menlhk/Setjen/Set.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024 merupakan rangkuman langkah – langkah pencapaian yang menjadi tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021-2024 adalah:

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;
2. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNPB. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor;

3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain)

2. Telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

Visi Gubernur DIY 2022 - 2027 "Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi." Adapun misi Gubernur DIY untuk mewujudkan visi tersebut adalah :

1. Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan;
2. Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan / pengelolaan sumber daya setempat;
3. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi;
4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik.

Berdasarkan visi misi Gubernur DIY tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai DLHK DIY 2022-2027 adalah :

"Tercapainya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari"

Sasaran :

1. Tercapainya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari
3. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Perangkat Daerah

F. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunungkidul 2025-2045

Berdasarkan dokumen Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045, terdapat 11 (sebelas) isu strategis pembangunan jangka panjang daerah, yaitu:

1. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. kemiskinan dan kondisi sosial ekonomi;
3. penguatan ketahanan pangan;
4. belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah menuju *good governance* serta pengembangan teknologi informasi;
5. daya saing perekonomian, investasi, dan iklim usaha yang belum optimal;
6. alih fungsi lahan;
7. penurunan kualitas lingkungan hidup penanganan sampah dan limbah;
8. ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim;
9. pemerataan infrastruktur dan mencapai universal akses;
10. kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak belum optimal; serta
11. penegakan hukum dan tata kelola yang belum optimal.

Dengan mempertimbangkan kondisi, aspek-aspek potensial, perkembangan global yang pesat, serta merujuk pada visi Indonesia Emas 2045 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Gunungkidul 2025-2045 dirumuskan sebagai “Gunungkidul yang Bermartabat, Maju, dan Berkelanjutan”.

Untuk mewujudkan visi tersebut dan mengacu pada 8 (delapan) misi pembangunan dalam RPJPD DIY, Kabupaten Gunungkidul menetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera
2. Mewujudkan Gunungkidul yang berdaya saing global
3. Memperkuat tata kelola pemerintah yang berintegritas
4. Penguatan supremasi hukum, keamanan dan stabilitas
5. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan tanggap bencana

Pencapaian visi tersebut dituangkan pada pentahapan pembangunan dengan mengusung tema **Penguatan Fondasi** pada periode **lima tahun pertama (tahun 2025-2029)**; Akselerasi Pembangunan pada periode II (tahun 2030-2034); Perluasan Pembangunan pada periode III (tahun 2035-2039); serta Perwujudan Visi Pembangunan pada periode IV (tahun 2040-2045).

G. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul 2025-2029

Berdasarkan tahapan pembangunan RPJMD 2025-2045, pada tahap pembangunan periode 2025-2029 berada di tahap Penguatan Fondasi. Arah kebijakan pada periode ini meliputi:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera;
2. Mewujudkan Gunungkidul yang berdaya saing global;
3. Memperkuat tata kelola pemerintah yang berintegritas;
4. Penguatan supremasi hukum, keamanan dan stabilitas;
5. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan tanggap bencana.

H. KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029

Berdasarkan pada dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029, terdapat 17 isu strategis pembangunan, yang dibagi menjadi empat pilar, yaitu :

Pilar Sosial

1. Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi
2. Rendahnya kualitas ketahanan pangan dan gizi
3. Masih adanya stunting dan pelayanan kesehatan belum optimal
4. Terbatasnya pelayanan pendidikan
5. Rendahnya pemenuhan hak dan perlindungan anak dan perempuan
6. Rendahnya kesadaran masyarakat mengikuti program keluarga berencana

Pilar Ekonomi

7. Belum optimalnya pengembangan perekonomian dan peningkatan kesempatan berusaha
8. Terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur
9. Terbatasnya pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan

Pilar Lingkungan

10. Akses penyediaan air minum dan pengelolaan sumber daya air belum merata
11. Belum terkelolanya bauran energi terbarukan
12. Masih rendahnya tingkat layanan pengelolaan sanitasi, persampahan, dan limbah B3
13. Ancaman peningkatan risiko bencana dan peningkatan kerentanan perubahan iklim
14. Degradasi lahan dan rendahnya pelestarian keanekaragaman hayati

Pilar Hukum dan Tata Kelola

15. Kurangnya kualitas tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik

16. Akselerasi transformasi digital pelayanan publik masih rendah
17. Kualitas penegakan hukum dan gangguan ketertiban umum masih rendah

2.2.2.2 Penetapan Isu Strategis

Berdasarkan kajian kondisi pengelolaan lingkungan hidup saat ini, pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul, telaahan visi, misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta berdasarkan kajian dokumen-dokumen perencanaan di atas, selanjutnya dapat diidentifikasi isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

1. Peningkatan Timbulan Sampah

Permasalahan lingkungan di Kabupaten Gunungkidul yang dominan saat ini adalah masalah persampahan. Setiap orang menghasilkan limbah/sampah dalam beragam bentuk, baik sampah organik maupun anorganik. Aktivitas penduduk yang semakin meningkat menyebabkan peningkatan timbulan sampah yang jika tidak dikendalikan akan berdampak pada penumpukan sampah yang menyebabkan pencemaran lingkungan.

2. Pencemaran Lingkungan (air, udara, dan kerusakan tanah)

Pencemaran lingkungan melalui media air, udara dan tanah menjadikan kualitas lingkungan hidup semakin menurun. Pencemaran ini bersumber dari kegiatan usaha/industri, rumah tangga maupun transportasi. Kondisi lingkungan yang tercemar bisa mengganggu keseimbangan ekosistem dan membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu kondisi lingkungan hidup yang tercemar perlu segera diatasi atau ditanggulangi dengan pencegahan, pengendalian, pengawasan dan pemulihan kualitas lingkungan.

3. Menurunnya Daya Dukung, Fungsi, dan Kualitas Lingkungan Hidup

Menurunnya daya dukung, fungsi, dan kualitas lingkungan hidup menggambarkan kondisi memburuknya kemampuan lingkungan untuk menopang kehidupan dan menjalankan fungsinya secara optimal. Daya dukung lingkungan merujuk pada kapasitas lingkungan untuk menyediakan sumber daya alam dan menyerap limbah tanpa mengalami kerusakan. Ketika daya dukung menurun, berarti lingkungan semakin tertekan dan tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan makhluk hidup secara berkelanjutan.

Fungsi lingkungan mencakup berbagai peran vital seperti penyediaan air bersih, udara segar, penyerapan karbondioksida, pengaturan iklim, dan penyediaan habitat keanekaragaman hayati. Penurunan fungsi lingkungan berarti kemampuan ini terganggu, misalnya kualitas udara menurun sehingga tidak sehat untuk dihirup.

Kualitas lingkungan hidup mengacu pada kondisi lingkungan yang layak bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk hidup dan berkembang. Penurunan kualitas ditandai dengan adanya pencemaran air, udara, dan tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya resiko bencana alam.

Penurunan ketiga aspek ini saling terkait dan seringkali disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan, seperti eksploitasi sumber daya alam berlebihan, pencemaran, dan alih fungsi lahan. Dampaknya sangat luas, mulai dari masalah kesehatan, kerugian ekonomi, hingga terganggunya keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Membalikkan tren penurunan ini memerlukan tindakan nyata dalam pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, pengendalian pencemaran, restorasi lingkungan, dan perubahan perilaku masyarakat.

4. Kurangnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menjadi kendala signifikan dalam upaya pelestarian lingkungan. Hal ini tercermin dari rendahnya kesadaran dan inisiatif individu maupun kelompok dalam praktik ramah lingkungan sehari-hari, seperti memilah sampah, menghemat air, menanam pohon, atau melaporkan pelanggaran lingkungan.

Minimnya keterlibatan masyarakat dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman tentang isu lingkungan dan dampaknya, kurangnya akses informasi dan edukasi yang efektif, kurangnya rasa kepemilikan terhadap lingkungan, atau bahkan kurangnya kepercayaan terhadap efektivitas tindakan individu. Akibatnya, beban pengelolaan lingkungan seringkali hanya bertumpu pada pemerintah dan pihak terkait lainnya, sementara potensi besar dari partisipasi masyarakat tidak dimanfaatkan secara optimal. Padahal, keterlibatan aktif masyarakat sangat penting. Kesadaran dan tindakan kolektif di tingkat komunitas dapat menjadi kekuatan besar dalam mencegah pencemaran, menjaga kebersihan lingkungan, dan mendorong praktik berkelanjutan. Meningkatkan peran serta masyarakat memerlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kesadaran, memberikan edukasi yang menarik dan relevan, memfasilitasi partisipasi dalam program lingkungan, serta membangun rasa tanggung jawab bersama terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Secara terperinci isu strategis Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada table 2.7 berikut:

Tabel 2.7
ISU STRATEGIS PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLIIS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Pengurangan dan penanganan sampah belum optimal 2. Pencemaran air, udara, tanah dan LBB yang semakin meningkat 3. Timbulnya dampak negatif akibat Usaha/Kegiatan 4. Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup 5. Rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 6. Belum terwujudnya kota yang berwawasan lingkungan 7. Belum teridentifikasinya keanekaragaman Hayati	1. Akses penyediaan air minum dan pengelolaan sumber daya air belum merata 2. Belum terlaksananya beauran energi terbarukan 3. Masih rendahnya tingkat layanan pengelolaan sanitasi, persampahan, dan limbah B3 4. Ancaman peningkatan risiko bencana dan peningkatan kerentanan perubahan iklim 5. Degradasi lahan dan rendahnya pelestarian keanekaragaman hayati	1. Persawahan Sumber Daya Alam 2. Perubahan Iklim	Degradasi lingkungan seperti penurunan muka tanah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan polusi udara akibat aktivitas industri	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim	1. Peningkatan timbulan sampah 2. Pencemaran Lingkungan (air, udara, dan kerusakan tanah) 3. Menurunnya daya dukung, fungsi, dan kualitas lingkungan hidup 4. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja Dinas Lingkungan Hidup lima tahun ke depan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan dijabarkan dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih periode 2025-2029 sehingga program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dapat dilaksanakan ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.

3.1.1 Visi

Visi adalah gambaran keadaan yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Dalam pembangunan daerah, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan kondisi daerah Kabupaten Gunungkidul dan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, seperti yang tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029, visi pembangunan Kabupaten Tahun 2025-2029 adalah:

TERWUJUDNYA MASYARAKAT ADIL MAKMUR, LESTARI DAN BERKEADABAN

Adapun penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat Adil Makmur

Adil Makmur bermakna masyarakat yang terpenuhi kebutuhan material maupun spiritual, yang berdaya saing dan inovatif. Masyarakat Gunungkidul sebagai subyek pembangunan yang mempunyai hak ikut dalam merencanakan dan melaksanakan, serta menikmati hasil pembangunan. Kesejahteraan secara inklusif pada semua aspek kehidupan. Semua warga Gunungkidul berkesempatan dalam meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat; melaksanakan hak-hak politik; menjaga keamanan dan ketertiban; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum, tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Kabupaten Gunungkidul yang berdaya saing dan inovatif dalam mengelola potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Masyarakat Lestari

Lestari merupakan perwujudan masyarakat pada khususnya dan Kabupaten Gunungkidul pada umumnya, yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan ramah lingkungan dengan mempertahankan kekhasan bentang alam geologi pegunungan sewu, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, kelestarian sumber daya alam, dan memiliki kehandalan dalam mitigasi bencana.

3. Masyarakat Berkeadaban

Berkeadaban bermakna masyarakat yang memiliki keimanan, jati diri, teladan, kehormatan, dan kemanusiaan. Keimanan menjadi landasan

moral, sementara jati diri tercermin dalam sikap yang menjunjung nilai budaya dan kearifan lokal. Masyarakat berkeadaban juga merupakan masyarakat bermartabat, yang memiliki harga diri, kehormatan, keadilan, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Setiap individu mendapatkan perlakuan adil dan kesempatan yang setara untuk berkembang. Dengan nilai-nilai tersebut, masyarakat dapat hidup harmonis, maju, dan berdaya saing.

3.1.2 Misi

Misi adalah pernyataan yang menjelaskan apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Untuk memberikan rumusan tentang upaya yang akan dilakukan untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029, terdapat 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri serta perluasan akses kesehatan untuk rakyat.
2. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
3. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
4. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.
5. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

Dinas Lingkungan Hidup sebagai dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang lingkungan hidup, mendukung misi pembangunan daerah ke lima yaitu :

**“Memajukan Kebudayaan Setempat dalam Semangat
Kebhinekaan dan Toleransi serta Menjaga Kelestarian Lingkungan
Hidup Warisan Leluhur Bangsa Indonesia”.**

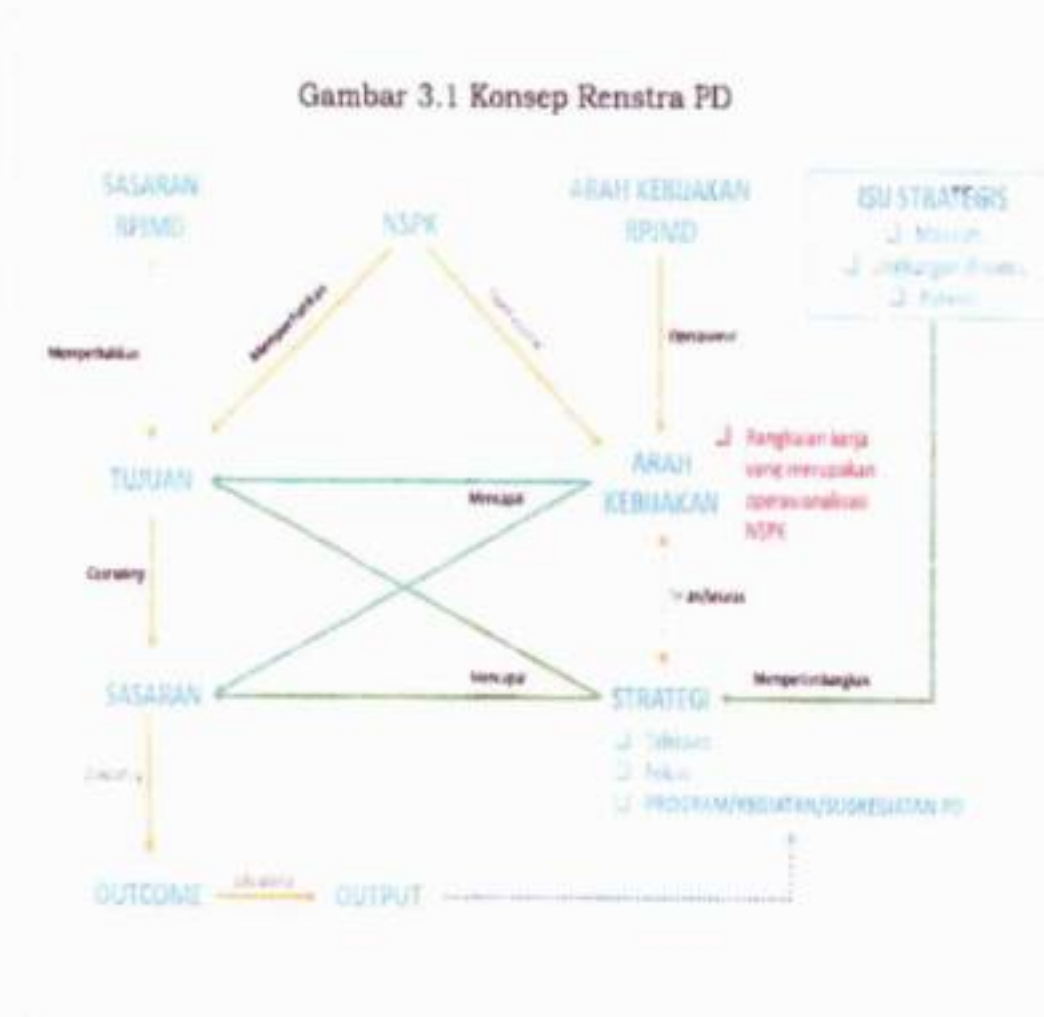
Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah tahun 2025-2029 tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah **Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Lestari.**

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

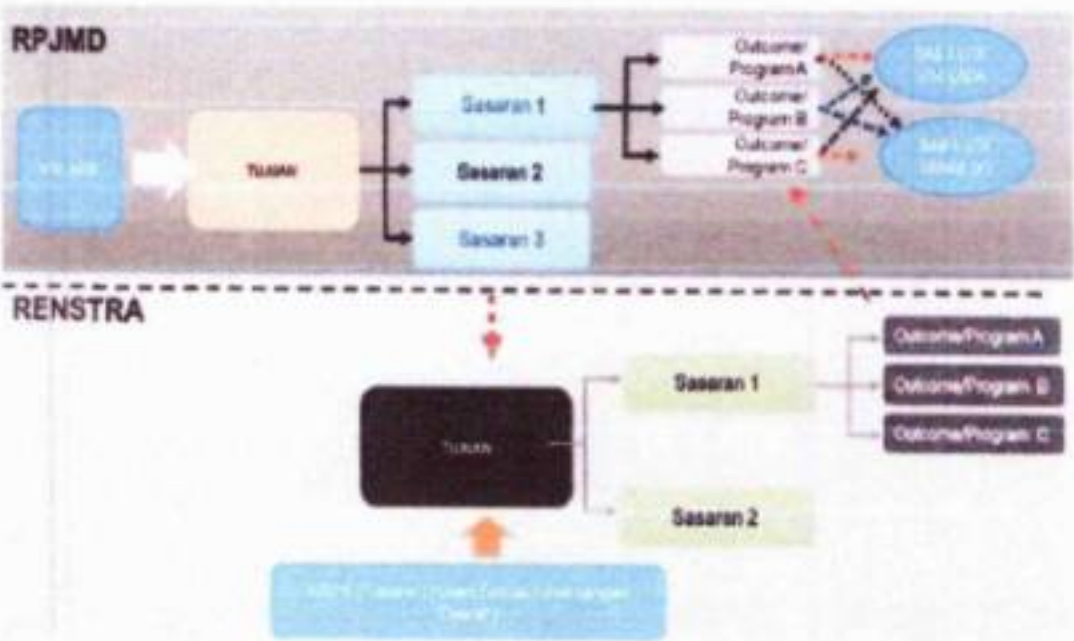
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/kegiatan yang disertai dengan

rencana tingkat capaian (target masing-masing indikator dari program dan kegiatan).

Konsep Renstra PD, kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Adapun Tujuan dan Sasaran yang hendak dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai misi pembangunan daerah Gunungkidul sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terwujud nya Ketahanan Sosial Budaya, dan Ekologi yang lestari	Terwujud nya Kualitas Lingkun gan Hidup yang Lestari		Persentase Kenaikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	19,75 %	18,30 %	19,67 %	18,23 %	18,20 %	
		Meningkatnya Upaya Pencegahan, Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	75,43	75,5	75,57	75,64	75,71	75,78	
			Indeks kualitas Udara	72,11	72,36	72,61	72,86	73,11	73,36	
			Indeks Kualitas Lahan	60,9	60,93	60,96	60,99	61,02	61,05	

3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup menggambarkan upaya dalam mencapai tujuan, sasaran dan target kinerja (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Strategi dan kebijakan tersebut menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya. Strategi arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

3.3.1 Perumusan Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Perumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 memperhatikan empat aspek yang ada di Kabupaten Gunungkidul, yakni terdiri dari Strengths (Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Peluang), dan Threats (Ancaman) yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.2
SWOT

	Strengths (Kekuatan) - Komitmen terhadap pelestarian budaya lokal dalam semangat kebhinekaan dan toleransi - Jejaring kerja dengan stakeholders meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, kelompok masyarakat, pemuka agama dan lainnya;	Weaknesses (Kelemahan) - Belum terwujudnya kota yang berwawasan lingkungan; - Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup; - Kurangnya sumber pendanaan; - Keterbatasan sarana dan prasarana kerja - Terbatasnya data informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
Opportunities (Peluang) Kemajuan teknologi yang membuka peluang digitalisasi budaya dan pendidikan lingkungan	Strategi S-O Mendorong digitalisasi budaya lokal dan pendidikan lingkungan hidup dengan memanfaatkan kemajuan teknologi serta dukungan regulasi pelestarian budaya	Strategi W-O - Memperkuat perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang berbasis teknologi spasial untuk mewujudkan kota berwawasan lingkungan - Mengembangkan ekowisata edukatif sebagai sarana pemberdayaan masyarakat serta pelestarian lingkungan dan budaya
Threats (Ancaman) - Hilangnya nilai-nilai budaya cinta lingkungan akibat arus globalisasi dan komersialisasi budaya - Permasalahan persampahan pada lima tahun kedepan akan menjadi permasalahan serius apabila tidak dilakukan perencanaan yang tepat dalam pengelolaannya - Perubahan iklim dan peningkatan risiko bencana alam - Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan ruang yang tidak berkelanjutan - Meningkatnya pembangunan sektor industri yang kurang memperhatikan aspek lingkungan	Strategi S-T - Meningkatkan kampanye lingkungan hidup - Mengutamakan upaya pengelolaan sampah (pemilahan sampah) pada sumbernya - Meningkatkan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta peningkatan pendidikan, pelatihan dan layanan lingkungan hidup - Mengembangkan system pengelolaan lingkungan yang adaptif terhadap perubahan iklim	Strategi W-T - Meningkatkan kapasitas dan koordinasi penanggulangan bencana untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan - Memperkuat literasi budaya dan pendidikan lingkungan hidup bagi generasi muda guna menjaga keberlanjutan nilai-nilai lokal

3.3.2 Strategi Perangkat Daerah.

Strategi adalah rencana yang terstruktur dan terorganisir untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Strategi melibatkan tindakan-tindakan yang spesifik dan terukur yang didasarkan pada analisis dan pengamatan lingkungan, termasuk faktor-faktor internal dan eksternal yang relevan.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Selanjutnya, strategi dan kebijakan ini akan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup lima tahun mendatang. Perencanaan dan penganggaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui Penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) yaitu mengalokasikan dana berdasarkan prioritas program yang terbukti efektif dengan skema penganggaran berbasis kinerja yaitu mengkaitkan pendanaan dengan hasil yang dicapai.

Dalam rangka menjamin ketercapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Renstra Lingkungan Hidup Tahun 2025–2029, pelaksanaan program dan kegiatan akan dilaksanakan melalui penahapan pembangunan tahunan yang disusun secara terencana dan sistematis. Penahapan ini merupakan prioritas pembangunan tahunan yang mengacu pada skala urgensi, efektivitas capaian, serta efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia. Penahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dapat dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Pentahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
Penguatan Pondasi Pembangunan melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan kolaborasi stakeholder dalam menjaga lingkungan hidup	Percepatan Pondasi Pembangunan melalui Penguatan Kelompok atau Lembaga dalam menjaga lingkungan hidup	Peningkatan pondasi pembangunan melalui Penguatan Peran Kelompok atau Lembaga dalam menjaga lingkungan hidup	Optimalisasi pondasi pembangunan melalui Pengawasan dan Pengendalian dalam menjaga lingkungan hidup	Pemantapan pondasi pembangunan melalui Perwujudan Kualitas Lingkungan Hidup yang lestari

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Perumusan kebijakan menunjukkan relevansi dan konsistensi antara pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.

Arah kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasional NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup.



Dengan memperhatikan operasional NSPK dan arah kebijakan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD, maka arah kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 dirumuskan dalam tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	Meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan pemantauan kualitas lingkungan hidup	
		Memperkuat upaya konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati untuk menjaga keseimbangan ekosistem	Meningkatkan kegiatan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan melalui konservasi lingkungan, adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim	
		Mengoptimalkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	a.Meningkatkan pembinaan pengendalian pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup b. Meningkatkan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	
		Mengoptimalkan sistem pengurangan, pengelolaan, dan pengolahan sampah serta limbah B3	a. Meningkatkan sosialisasi, bimtek, pembentukan kelompok dan fasilitasi, pengelolaan persampahan dengan 3R b. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan persampahan	
		Mendorong pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dengan perencanaan berbasis prinsip keberlanjutan	Meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati dengan peningkatan RTH (Ruang Terbuka Hijau)	

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta untuk mempermudah dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup selama lima tahun mendatang, maka ditetapkan strategi sebagai berikut :



Tabel 3.5
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi	"Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"		
Misi	Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Lestari	Meningkatnya Upaya Pencegahan, Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	Meningkatkan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH	Meningkatkan pemantauan kualitas lingkungan hidup
		Meningkatkan efektifitas perlindungan terhadap fungsi-fungsi lingkungan hidup serta pemulihan kerusakan lingkungan melalui upaya konservasi di kawasan ekoregion	Meningkatkan kegiatan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan melalui konservasi lingkungan, adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim
		Meningkatkan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH serta Peningkatan Layanan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan LH	a. Meningkatkan pembinaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup b. Meningkatkan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup
		Mengutamakan upaya pengelolaan sampah (pemilahan sampah dan 3R) pada sumbernya	a. Meningkatkan sosialisasi, bimtek, pembentukan kelompok dan fasilitasi, pengelolaan persampahan dengan 3R b. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan persampahan
		a. Menyusun Database Keanekaragaman Hayati dan Menghitung Indeks Keanekaragaman Hayati b. Mengembangkan Jenis Keanekaragaman Hayati Lokal untuk Memperkaya Taman Kehati Kabupaten Gunungkidul c. Meningkatkan Kualitas RTH Publik dengan Tanaman Lokal yang Memperkaya Keanekaragaman Hayati d. Mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pengembangan RTH Privat dengan gerakan menanam pohon lokal	Meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati dengan peningkatan RTH (Ruang Terbuka Hijau)

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Sebagai upaya untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2025-2029 yang telah dirumuskan dalam tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dan akan dicapai oleh Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah menterjemahkannya ke dalam program-program yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program yang disusun di dalamnya harus mencerminkan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Lingkungan Hidup. Adapun program yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup selama periode tahun 2025-2029 adalah:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
4. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
5. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
6. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
7. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
11. Program Pengelolaan Persampahan.

4.2 Uraian Kegiatan

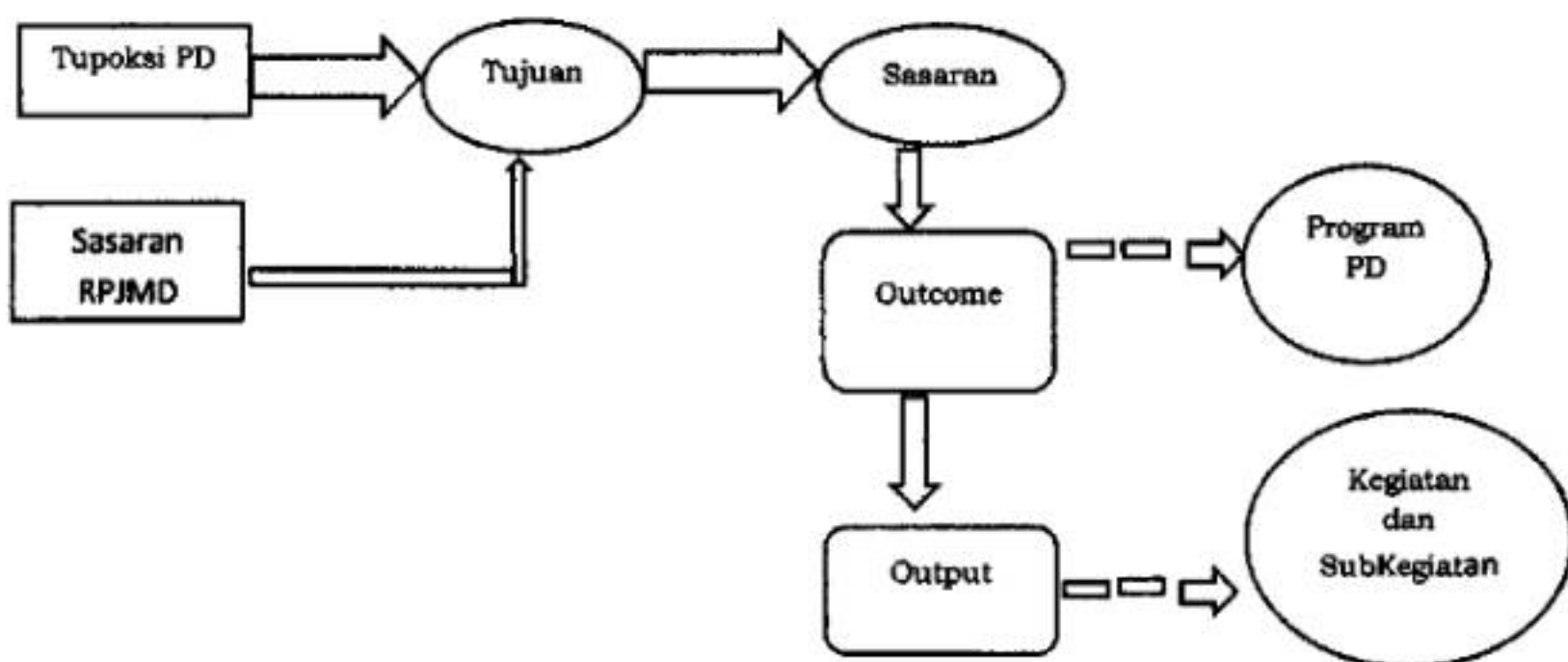
Kegiatan adalah penjabaran dari program yang memiliki tujuan spesifik dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan memberikan arah untuk mencapai tujuan strategis dan berkontribusi pada visi dan misi. Dalam satu kegiatan biasanya terdiri dari satu atau lebih sub kegiatan.

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Sub kegiatan adalah bagian dari suatu kegiatan utama yang lebih terperinci, yang terdiri dari beberapa rekening belanja yang spesifik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun bagan alur dalam perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1.
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah



Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai pembangunan daerah dimulai dari tahun 2026 sampai tahun 2030. Program tahun 2030 merupakan upaya dari menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode 2030-2034.

Dalam program yang telah ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan berbagai kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung pencapaian target masing-masing program. Indikator untuk masing-masing kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel 4.1, sedangkan pagu pendanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat di tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Rancangan Strategis Perangkat Daerah

ESPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup							
- Terciptanya Kondisi Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Lestari				Persentase kenaikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
		Merangkainya Upaya Pencegahan, Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup			Indeks Kualitas Air		
					Indeks Kualitas Udara		
					Indeks Kualitas Lahan		
		Terwujudnya Kawasan Ruang Strategis Kabupaten Gunungkidul yang Optimal di Bidang Konservasi dan Kerusakan Lahan			Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Terlaksana Dengan Baik	1.03.13 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	

KEPE DAS SARAS RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SARAS	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Terwujudnya Kawasan Ruang Strategis Kabupaten Gunungkidul yang Optimal di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas		Persentase sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai	1.03.13 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	
			Terwujudnya Kawasan Ruang Strategis Kabupaten Gunungkidul yang Optimal di Bidang Konservasi dan Kerusakan Lahan	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kari Gunung Sewu	1.03.13.5.02 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	
					Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	1.03.13.5.02 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	
					Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	1.03.13.5.02.0002 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	
					Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kari Gunung Sewu	1.03.13.5.02.0003 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kari Gunung Sewu	
			Terwujudnya Kawasan Ruang Strategis Kabupaten Gunungkidul yang Optimal di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas	Unit Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	1.03.13.5.04 - Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	

RSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Kelestarian Urusan Tata Ruang	1.03.13.5.04.0001 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Kelestarian Urusan Tata Ruang	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.11.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.11.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2.11.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.11.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

RPK DAN SASARAN RPMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDEKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.11.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.11.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.11.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.11.01.2.02.0001 - Penyetoran Gaji dan Tunjangan ASN	

KSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.11.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trisulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Trisulan / Semesteran SKPD	2.11.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trisulan/ semesteran SKPD	
				Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.11.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2.11.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	2.11.01.2.06 - Administrasi	

NSPN DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.11.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.11.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.11.01.2.06.0003 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Karyawan Tama	2.11.01.2.06.0008 - Fasilitas Karyawan Tama	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KEY
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milk Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.11.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.11.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.11.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDEKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					yang Disediakan	Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	2.11.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Periznan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

RPSP DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.11.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Tingkat Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak KRP		Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2.11.02.2.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	
			Memerumahnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup-Urusan Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapabilitas		Persentase Kualitas Lingkungan Hidup dalam Kondisi Baik	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	

NSPK DAN SASARAN RP/RMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Urusan Konservasi dan Kerusakan Lahan		Persentase Laporan Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah yang Tersusun dan Terpublikasi	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Urusan Laboratorium		Persentase Parameter yang Dapat Diuji	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Urusan Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas	Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Urusan Pengendalian Pencemaran	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Didasarkan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Urusan Laboratorium	Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Urusan Laboratorium	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	

RSPE DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDEKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Urusan Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas	Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Urusan Pengendalian Pencemaran	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
			Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Urusan Laboratorium	Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Urusan Laboratorium	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	
			Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Urusan Konservasi dan Kerusakan Lahan	Laporan informasi kerja pengelolaan lingkungan hidup dalam satu tahun	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	

ESPK DAN SASARAN KPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDEKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati urusan Konservasi dan Kerusakan Lahan		Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati urusan Kebersihan dan Pertamanan		Persentase Taman Perkotaan Terpelihara dengan Baik	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
				Luas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Urusan Kebersihan dan Pertamanan	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati urusan Konservasi dan Kerusakan Lahan	Luas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Urusan Konservasi dan Kerusakan Lahan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	

RPK DAN SASARAN KPIKD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDUKTOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati urusan Kebersihan dan Pertamanan	Luar Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Urusan Kebersihan dan Pertamanan	Luar RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati urusan Konservasi dan Kerusakan Lahan	Luar Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Urusan Konservasi dan Kerusakan Lahan	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	
					Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01.0009 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	
			Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		Persentase Limbah B3 yang dikelola	2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	

RPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDEKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Dokumen Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	2.11.05.2.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	
			Tingkat Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Peraturan Lingkungan yang Diberlakukan		Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Peraturan Lingkungan dan PUU LH	2.11.06 - PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	

RSRK DAN SARAN UMUM YANG RELEVAN	TUJUAN	SARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Laporan Pembinaan dan Pengawasan Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	2.11.05.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang lain Lingkungan dan lain PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	2.11.05.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup Urusan Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas		Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup Urusan Konservasi dan Kerusakan Lahan		Persentase Masyarakat yang Meningkatkan Kapasitas/Kemampuannya dalam Pelestarian Sumber Daya Alam	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	

RSPE DAN SARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup Urusan Pengendalian Pencemaran dan Penguatan Kapasitas	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Urusan Penguatan Kapasitas	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup Urusan Konservasi dan Kerusakan Lahan	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Urusan Konservasi dan Kerusakan Lahan	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup Urusan Pengendalian Pencemaran dan Penguatan Kapasitas	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan Perumahan Gerakan Prulu dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

REPEK DAN SARASAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SARASAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pengembangan Kapasitas			
					Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup Urusan Konservasi dan Kerusakan Lahan	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Urusan Konservasi dan Kerusakan Lahan	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup Urusan Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Urusan	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	

KSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Pengembangan Kapasitas			
			Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2.11.09 - PROGRAM PERHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
				Entitas Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Terselenggaranya Sengketa/Kasus Dugaan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup		Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Dugaan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.10 - PROGRAM PERANGKATAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Kasus Dugaan Pencemaran dan Kerusakan	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Lingkungan Hidup			
					Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Tata Kelola Persampahan Urusan Pengelolaan Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas		Pengelolaan Sampah (Preparasi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Pembiayaan Pengumpulan Sampah)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
			Meningkatnya Tata Kelola Persampahan Urusan Kebersihan dan Pertamanan		Persentase Penanganan Sampah di Wilayah Kabupaten	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
			Meningkatnya Tata Kelola Persampahan Urusan Pengelolaan Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas	Indeks Pengelolaan Sampah Urusan Pengembangan Kapasitas	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlihat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
			Meningkatnya Tata Kelola Persampahan Urusan Kebersihan dan Pertamanan	Indeks Pengelolaan Sampah Urusan Kebersihan dan Pertamanan	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TIPSTKabupaten/kota atau TPA/TIPST Regional	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	

RSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Tata Kelola Persampahan Urusan Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas	Indeks Pengelolaan Sampah Urusan Pengembangan Kapasitas	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
			Meningkatnya Tata Kelola Persampahan Urusan Kebersihan dan Pertamanan	Indeks Pengelolaan Sampah Urusan Kebersihan dan Pertamanan	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
			Meningkatnya Tata Kelola Persampahan Urusan Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas	Unit Pembiayaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak swasta	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	2.11.11.2.03 - Pembiayaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	
					Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	2.11.11.2.03.0002 - Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE RE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2024		2025		2026		2027		2028			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Dokumen Pemanfaatan Ruang Sesuai Ruang Strategis Konsultasi dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Sesuai Ruang Strategis Pantai Selatan	4	12	12.326.917. 000,00	1	3.500.000,0 00,00	1	3.500.000,0 00,00	1	3.500.000,0 00,00	1	3.500.000,0 00,00		
	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Sesuai Ruang Strategis Karet Gunung Sewu	1	1		1		1		1		1			
1.03.13.5.02.0002 Pemanfaatan Ruang Sesuai Ruang Strategis Pantai Selatan				12.000.000. 000,00		3.200.000,0 00,00		3.200.000,0 00,00		3.200.000,0 00,00		3.200.000,0 00,00		
Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Sesuai Ruang Strategis Pantai Selatan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Sesuai Ruang Strategis Pantai Selatan	4	12	12.000.000. 000,00	1	3.200.000,0 00,00	1	3.200.000,0 00,00	1	3.200.000,0 00,00	1	3.200.000,0 00,00		
1.03.13.5.02.0003 Pemanfaatan Ruang Sesuai Ruang Strategis Karet Gunung Sewu				326.917.000. ,00		300.000.000. ,00		300.000.000. ,00		300.000.000. ,00		300.000.000. ,00		
Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Sesuai Ruang Strategis Karet	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Sesuai Ruang Strategis Karet Gunung Sewu	1	1	326.917.000. ,00	1	300.000.000. ,00	1	300.000.000. ,00	1	300.000.000. ,00	1	300.000.000. ,00		

MIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Gundung Sewu														
Terwujudnya Kawasan Ruang Strategis Kabupaten Gunungkidul yang Optimal di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas	Perserutan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai	-	-	-	77.78	1.000.000.0 00,00	83.33	1.000.000.0 00,00	88.89	1.000.000.0 00,00	94.44	1.000.000.0 00,00		
1.03.13.5.04 - Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang				-		1.000.000.0 00,00		1.000.000.0 00,00		1.000.000.0 00,00		1.000.000.0 00,00		
Unit Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	0	0	-	1	1.000.000.0 00,00	1	1.000.000.0 00,00	1	1.000.000.0 00,00	1	1.000.000.0 00,00		
1.03.13.5.04.0001 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang				-		1.000.000.0 00,00		1.000.000.0 00,00		1.000.000.0 00,00		1.000.000.0 00,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SARAF NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Produktif Pelayanan Kegiatan Kelembagaan Unit Tata Ruang	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Produktif Pelayanan Kegiatan Kelembagaan Unit Tata Ruang	0	0	-	1	1.000.000,0 00,00	1	1.000.000,0 00,00	1	1.000.000,0 00,00	1	1.000.000,0 00,00		
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				11.916.394, 797,00		12.406.158, 623,16		12.544.388, 802,80		12.902.476, 466,45		12.956.696, 062,78		
2.11.01 - PROGRAM PENGUJIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.061.585,7 97,00		3.989.093,8 32,16		4.069.917,4 23,80		4.136.177,5 00,45		4.189.396,1 72,78		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pengantar Daerah	Sifat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	82,32	83,32	3.061.585,7 97,00	83,82	3.989.093,8 32,16	84,32	4.069.917,4 23,80	84,82	4.136.177,5 00,45	85,32	4.189.396,1 72,78	2.11.0.000.0 0.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				48.380.000, 00		54.277.950, 00		49.849.389, 00		56.145.276, 00		57.168.164, 00		
Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen Pengajuan DPA-SDPD dan Laporan Hasil	2	2	48.380.000, 00	2	54.277.950, 00	2	49.849.389, 00	2	56.145.276, 00	2	57.168.164, 00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SEPD													
	Jumlah Dokumen DPA- SEPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SEPD	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Pencapaian Perangkat Daerah	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SEPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SEPD	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA- SEPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SEPD	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SEPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SEPD	17	17		17		17		17		17			

SIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SARAN RE TARUS 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	2		2		2		2		2			
2.11.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.250.000,0 0		10.656.000, 00		5.355.000,0 0		10.761.000, 00		10.910.000, 00		
Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	5.250.000,0 0	3	10.656.000, 00	3	5.355.000,0 0	3	10.761.000, 00	3	10.910.000, 00		
2.11.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.535.000,0 0		1.580.000,0 0		1.581.000,0 0		1.612.620,0 0		1.628.000,0 0		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1.535.000,0 0	1	1.580.000,0 0	1	1.581.000,0 0	1	1.612.620,0 0	1	1.628.000,0 0		
2.11.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				900.000,00		925.000,00		943.500,00		962.370,00		980.000,00		

KIDANG URBAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SARRELI RE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PENGANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	900.000,00	1	925.000,00	1	943.500,00	1	962.370,00	1	990.000,00		
2.11.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD				1.850.000,0 0		1.868.500,0 0		1.905.870,0 0		1.943.987,0 0		1.960.000,0 0		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	1.850.000,0 0	2	1.868.500,0 0	2	1.905.870,0 0	2	1.943.987,0 0	2	1.960.000,0 0		
2.11.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.500.000,0 0		1.560.000,0 0		1.591.200,0 0		1.623.024,0 0		1.670.000,0 0		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2	1.500.000,0 0	2	1.560.000,0 0	2	1.591.200,0 0	2	1.623.024,0 0	2	1.670.000,0 0		
2.11.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan				35.995.000, 00		36.334.550, 00		37.062.049, 00		37.823.549, 00		38.580.144, 00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SARAF RE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
Terwujudnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17	17	35.995.000, 00	17	36.354.500, 00	17	37.042.049, 00	17	37.823.040, 00	17	38.580.364, 00		
2.11.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.350.000,0 0		1.363.500,0 0		1.393.770,0 0		2.418.585,0 0		1.430.000,0 0		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	2	1.350.000,0 0	2	1.363.500,0 0	2	1.393.770,0 0	2	2.418.585,0 0	2	1.430.000,0 0		
2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.918.095,7 97,00		2.947.323,0 00,16		3.006.269,4 65,80		3.066.374,0 04,45		3.070.132,3 71,78		
Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	573	546	2.918.095,7 97,00	490	2.947.323,0 00,16	490	3.006.269,4 65,80	448	3.066.374,0 04,45	420	3.070.132,3 71,78		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASIS RE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KRITERIA PGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	13		13		13		13		13			
2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.910.220,7 97,00		2.939.323,0 05,16		2.998.109,4 65,80		3.058.071,6 54,45		3.061.652,3 71,78		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	573	546	2.910.220,7 97,00	490	2.939.323,0 05,16	490	2.998.109,4 65,80	448	3.058.071,6 54,45	420	3.061.652,3 71,78		
3.11.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.000.000,0 0		2.000.000,0 0		2.040.000,0 0		2.060.000,0 0		2.080.000,0 0		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	1	2.000.000,0 0	1	2.000.000,0 0	1	2.040.000,0 0	1	2.060.000,0 0	1	2.080.000,0 0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDEKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL2 NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA- NGAN
			2024		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
2.11.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				5.875.000,0 0		6.000.000,0 0		6.120.000,0 0		6.242.400,0 0		6.400.000,0 0		
Terselenggara Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se- mesteran SKPD	13	13	5.875.000,0 0	13	6.000.000,0 0	13	6.120.000,0 0	13	6.242.400,0 0	13	6.400.000,0 0		
2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				17.536.000, 00		190.226.997 ,00		194.271.435 ,00		198.594.863 ,00		200.476.712 ,00		
Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai Berlaku Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	3	17.536.000, 00	3	190.226.997 ,00	3	194.271.435 ,00	3	198.594.863 ,00	3	200.476.712 ,00		



KIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SASARAN RE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-		
2.11.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				-	172.226.897 ,00		175.671.435 ,00		179.184.863 ,00		180.976.712 ,00			
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	12	-	12	172.226.897 ,00	12	175.671.435 ,00	12	179.184.863 ,00	12	180.976.712 ,00		
2.11.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				17.550.000, 00		18.000.000, 00		18.600.000, 00		19.200.000, 00		19.500.000, 00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	3	17.550.000, 00	3	18.000.000, 00	3	18.600.000, 00	3	19.200.000, 00	3	19.500.000, 00		
2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				241.370.600 ,00		244.156.380 ,00		252.492.342 ,00		268.918.879 ,00		282.730.002 ,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	KASELI NO TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Kemitraan SKPD	12	12	241.370.000 ,00	12	244.156.380 ,00	12	252.442.342 ,00	12	268.918.879 ,00	12	282.730.002 ,00		
	Jumlah Paket Pendirian dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	14		14		14		15		15			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pemasangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggunaan yang Disediakan	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12		12		12		12		12			
2.11.01-2.06.0001- Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Pemasangan Bangunan Kantor				4.400.000,0 0		4.444.000,0 0		4.532.880,0 0		4.623.538,0 0		4.669.773,0 0		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Pemasangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pemasangan	4	4	4.400.000,0 0	4	4.444.000,0 0	4	4.532.880,0 0	4	4.623.538,0 0	4	4.669.773,0 0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SARAF RE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(14)	(15)
Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan													
2.11.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				54.000.000, 00		54.540.000, 00		55.083.634, 00		71.641.997, 00		83.480.352, 00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	14	54.000.000, 00	14	54.540.000, 00	14	55.083.634, 00	15	71.641.997, 00	15	83.480.352, 00		
2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Pencetakan				9.332.900,0 0		10.000.000, 00		10.200.000, 00		10.404.000, 00		10.508.040, 00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Pencetakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pencetakan yang Disediakan	5	5	9.332.900,0 0	5	10.000.000, 00	5	10.200.000, 00	5	10.404.000, 00	5	10.508.040, 00		
2.11.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				5.000.000,0 0		5.030.000,0 0		5.151.000,0 0		5.254.020,0 0		5.306.560,0 0		
Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Fasilitas Kunjungan Tamu	15	12	5.000.000,0 0	12	5.030.000,0 0	12	5.151.000,0 0	12	5.254.020,0 0	12	5.306.560,0 0		
2.11.01.2.06.0009 - Pengembangan Materi Koordinasi dan				168.438.000 ,00		170.122.580 ,00		173.334.834 ,00		176.995.324 ,00		178.765.277 ,00		

WILAYAH / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SARAN RE TASUR 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Konsultasi SKPD														
Terlaksananya Pengelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pengelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	168.438.000 ,00	12	170.122.380 ,00	12	173.524.828 ,00	12	176.995.324 ,00	12	178.765.277 ,00		
2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah				18.331.000, 00		22.500.000, 00		25.653.000, 00		13.005.000, 00		21.450.000, 00		
Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	1	18.331.000, 00	3	22.500.000, 00	3	25.653.000, 00	1	13.005.000, 00	1	21.450.000, 00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	3		2		2		1		1			
2.11.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				10.896.000, 00		10.000.000, 00		8.058.000,0 0		4.335.000,0 0		4.950.000,0 0		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	1	10.896.000, 00	3	10.000.000, 00	3	8.058.000,0 0	1	4.335.000,0 0	1	4.950.000,0 0		
2.11.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.435.000,0 0		12.500.000, 00		17.595.000, 00		8.670.000,0 0		16.500.000, 00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	2	3	7.435.000,0 0	2	12.500.000, 00	2	17.595.000, 00	1	8.670.000,0 0	1	16.500.000, 00		

BEDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SASARAN RE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PERAKORAT DAERAH	KETERA- NGAN
			2024		2025		2026		2027		2028			
			TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Disediakan													
2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				268.358.100 ,00		371.247.600 ,00		378.672.552 ,00		386.246.003 ,00		389.108.464 ,00		
Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	3	268.358.100 ,00	2	371.247.600 ,00	3	378.672.552 ,00	2	386.246.003 ,00	2	389.108.464 ,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	36		36		36		36		36			
2.11.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				66.760.000, 00		67.427.600, 00		68.776.152, 00		70.151.675, 00		70.853.192, 00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	66.760.000, 00	12	67.427.600, 00	12	68.776.152, 00	12	70.151.675, 00	12	70.853.192, 00		
2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber				65.000.000, 00		65.650.000, 00		66.963.000, 00		68.302.360, 00		68.983.283, 00		

KEDASIHAN / PROGRAM / OUTCOME / KELOMPOK / SUBKELOMPOK OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	RABRI KE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA- SIAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Daya Air dan Listrik														
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	36	65.000.000, 00	36	65.650.000, 00	36	66.963.000, 00	36	68.302.260, 00	36	68.985.283, 00		
2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				136.598.100 ,00		238.170.000 ,00		342.933.400 ,00		347.792.068 ,00		349.259.989 ,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	3	136.598.100 ,00	2	238.170.000 ,00	2	342.933.400 ,00	2	347.792.068 ,00	2	349.259.989 ,00		
2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				149.500.000 ,00		159.362.000 ,00		162.709.240 ,00		167.103.425 ,00		168.324.489 ,00		
Dokumen Pemeliharaan Bangun Milik Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	37	149.500.000 ,00	46	159.362.000 ,00	48	162.709.240 ,00	50	167.103.425 ,00	51	168.324.489 ,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	RESEL KE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	13	13		13		13		13		13			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Dirawat	20	17		17		17		18		18			
2.11.01.2.09.0002 - Perbaikan Jaki Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				95.700.000, 00		96.657.000, 00		98.590.140, 00		100.561.943, 00		101.567.562, 00		
Terwujudnya Jaki Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	13	13	95.700.000, 00	13	96.657.000, 00	13	98.590.140, 00	13	100.561.943, 00	13	101.567.562, 00		
2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Perawatan dan Meori				14.500.000, 00		14.645.000, 00		14.937.900, 00		15.236.608, 00		15.389.025, 00		

KEDANG KRUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEDGATAN / SUBKEDGATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2024		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Lainya														
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	37	14.500.000, 00	46	14.645.000, 00	48	14.937.900, 00	50	15.236.858, 00	51	15.389.025, 00		
2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				33.300.000, 00		42.000.000, 00		43.000.000, 00		45.000.000, 00		45.000.000, 00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	33.300.000, 00	1	42.000.000, 00	1	43.000.000, 00	1	45.000.000, 00	1	45.000.000, 00		
2.11.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.060.000,0 0		6.060.000,0 0		6.181.200,0 0		6.304.824,0 0		6.367.872,0 0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	17	6.060.000,0 0	17	6.060.000,0 0	17	6.181.200,0 0	18	6.304.824,0 0	18	6.367.872,0 0		

KIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SARAF RE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				49.255.000, 00		49.747.550, 00		50.742.501, 00		51.757.351, 00		52.274.925, 00		
Tingkat Efektifitas Kajian Lingkungan untuk Menggali Dampak KRT	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100	80	49.255.000, 00	81	49.747.550, 00	82	50.742.501, 00	83	51.757.351, 00	84	52.274.925, 00	2.11.0.000.0 6.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.02.2.01 Rencana Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPH) Kabupaten/Kota				49.255.000, 00		49.747.550, 00		50.742.501, 00		51.757.351, 00		52.274.925, 00		
Dokumen Rencana Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telah Selesaikan yang Telah Mengakomodir RPPH Kabupaten / Kota	15	15	49.255.000, 00	15	49.747.550, 00	15	50.742.501, 00	15	51.757.351, 00	15	52.274.925, 00		
2.11.02.2.01.0002 - Pengendalian Praktik RPPH Kabupaten/Kota				49.255.000, 00		49.747.550, 00		50.742.501, 00		51.757.351, 00		52.274.925, 00		
Terselesaikan Dokumen Telah Selesaikan yang Telah Mengakomodir RPPH	Jumlah Dokumen Telah Selesaikan yang Telah Mengakomodir RPPH Kabupaten / Kota	15	15	49.255.000, 00	15	49.747.550, 00	15	50.742.501, 00	15	51.757.351, 00	15	52.274.925, 00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASIS TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kabupaten/Kota														
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				737.745.000 ,00		654.172.450 ,00		662.155.900 ,00		675.399.018 ,00		681.153.007 ,00		
Menurunkan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Urutan Konservasi dan Kerusakan Lahan	Pemetaan Laporan Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah yang Tersusun dan Terpubikasi	-	100	75.000.000, 00	100	75.750.000, 00	100	77.265.000, 00	100	78.810.300, 00	100	79.598.403, 00	2.11.03.03.01 0.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.03.2.02 - Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				75.000.000, 00		75.750.000, 00		77.265.000, 00		78.810.300, 00		79.598.403, 00		
Laporan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup dalam satu tahun	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dibekukan	2	2	75.000.000, 00	2	75.750.000, 00	2	77.265.000, 00	2	78.810.300, 00	2	79.598.403, 00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SASARAN RE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAIRAH	KETERA- NGAN
			2025		2027		2028		2029		2030			
			TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat				75.000.000, 00		75.750.000, 00		77.265.000, 00		78.810.300, 00		79.358.403, 00		
Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2	2	75.000.000, 00	2	75.750.000, 00	2	77.265.000, 00	2	78.810.300, 00	2	79.358.403, 00		
Menurutnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Uraian Laboratorium	Persentase Parameter yang Dapat Diuji	-	88,24	380.000.000 ,00	91,18	388.800.000 ,00	94,12	391.476.000 ,00	97,06	399.305.520 ,00	100	402.298.575 ,00		
2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				652.745.600 ,00		878.422.450 ,00		584.890.900 ,00		596.388.718 ,00		601.554.604 ,00		
Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	3	3	380.000.000 ,00	3	388.800.000 ,00	3	391.476.000 ,00	3	399.305.520 ,00	3	402.298.575 ,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SARJEL RE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PENINGKAT DAIRYAN	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kabupaten/Kota Urutan Laboratorium														
2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				380.000.000 ,00		388.800.000 ,00		391.476.000 ,00		399.305.520 ,00		402.298.575 ,00		
Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	3	3	380.000.000 ,00	3	388.800.000 ,00	3	391.476.000 ,00	3	399.305.520 ,00	3	402.298.575 ,00		
Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Urutan Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas	Pemeriksaan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Kondisi Baik	-	71.90	282.745.000 ,00	73.81	189.622.450 ,00	75.72	193.414.900 ,00	77.63	197.283.198 ,00	79.54	199.256.029 ,00		
2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				662.745.000 ,00		578.432.450 ,00		584.890.900 ,00		596.588.718 ,00		601.554.604 ,00		
Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah	1	1	282.745.000 ,00	1	189.622.450 ,00	1	193.414.900 ,00	1	197.283.198 ,00	1	199.256.029 ,00		

BEDANG URBAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kabupaten/ Kota Urutan Pengendalian Pencemaran	Air, Udara, dan Laut													
2.11.03.2.01.0001 - Kesehatan, Berkualitas, dan Pelayanan Pengelolaan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				282.743.000 .00		189.622.450 .00		193.414.900 .00		197.283.198 .00		199.256.029 .00		
Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1	1	282.743.000 .00	1	189.622.450 .00	1	193.414.900 .00	1	197.283.198 .00	1	199.256.029 .00		
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHAYATI)				1.576.074.0 00.00		1.609.070.9 41.00		1.663.352.3 57.00		1.676.898.8 22.00		1.672.329.8 77.00		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati terutama: Kebersihan dan	Persentase Tumbuhan Perkotaan Terpelihara dengan Baik	100	100	1.586.644.0 00.00	100	1.535.260.4 40.00	100	1.587.904.4 46.00	100	1.593.743.7 53.00	100	1.594.981.1 90.00	2.11.0.00.0.0 0.01.0000 - Dinas Lingkungan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIS RE TAHUN 2024	TARGET DAX PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
011)	010)	013)	014)	015)	016)	017)	018)	019)	020)	021)	022)	023)	024)	025)
Pertamanan													Hisap	
2.11.04.2.01 - Pengelolaan Kebersihan Hajati Kabupaten/Kota				1.376.074,0 00,00		1.606.070,9 41,00		1.663.252,3 57,00		1.670.598,6 22,00		1.672.329,8 77,00		
Luar Pengelolaan Kebersihan Hajati Kabupaten/Kota Urutan Kebersihan dan Pertamanan	Luar RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1,02	1,02	1.386.644,0 00,00	1,02	1.335.200,4 40,00	1,02	1.387.904,4 46,00	1,02	1.393.743,7 53,00	1,02	1.394.581,1 90,00		
2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				1.386.644,0 00,00		1.335.200,4 40,00		1.387.904,4 46,00		1.393.743,7 53,00		1.394.581,1 90,00		
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luar RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1,02	1,02	1.386.644,0 00,00	1,02	1.335.200,4 40,00	1,02	1.387.904,4 46,00	1,02	1.393.743,7 53,00	1,02	1.394.581,1 90,00		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kebersihan Hajati uraian Kebersihan dan Kebersihan Lain	Pertemuan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	54	54	189.430.000 .00	60	73.070.301, 00	62	75.347.911, 00	64	76.854.866, 00	66	77.548.687, 00		
2.11.04.2.01 - Pengelolaan Kebersihan Hajati				1.376.074,0 00,00		1.606.070,9 41,00		1.663.252,3 57,00		1.670.598,6 22,00		1.672.329,8 77,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SABELI KE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kabupaten/Kota														
Luas Pengelolaan Kelembagaan Hayati Kabupaten/Kota Urutan Konservasi dan Kerusakan Lahan	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	3	10	189.430.000,00	3	73.870.501,00	3	75.347.911,00	3	76.854.869,00	3	77.348.587,00		
	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	10	1		1		1		1		1			
2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Kelembagaan Hayati Lainnya				174.120.000,00		58.407.401,00		59.575.549,00		60.767.060,00		61.100.000,00		
Taman Kelembagaan Hayati Lainnya yang dikelola	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	3	10	174.120.000,00	3	58.407.401,00	3	59.575.549,00	3	60.767.060,00	3	61.100.000,00		
2.11.04.2.01.0009 - Pengelolaan Taman Kelembagaan Hayati di Luar Kawasan Hutan				15.310.000,00		15.463.100,00		15.772.362,00		16.087.809,00		16.248.587,00		
Taman Kelembagaan Hayati di Luar	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang dikelola Lingkup	10	1	15.310.000,00	1	15.463.100,00	1	15.772.362,00	1	16.087.809,00	1	16.248.587,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kawasan Hutan yang Dikelola	Kecamatan Kabupaten/Kota													
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				750.000,00		109.450.000 ,00		72.000.000, 00		72.000.000, 00		72.000.000, 00		
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang dikelola	-	80	750.000,00	80	109.450.000 ,00	80	72.000.000, 00	80	72.000.000, 00	80	72.000.000, 00	2.11.0.00.0.0 8.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				750.000,00		109.450.000 ,00		72.000.000, 00		72.000.000, 00		72.000.000, 00		
Dokumen Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengungkapan, Pemanfaatan,	0	1	750.000,00	1	109.450.000 ,00	1	72.000.000, 00	1	72.000.000, 00	1	72.000.000, 00		

BEDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SASARAN RE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2024		2025		2026		2027		2028			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pengolahan, dan/atau Pemusnahan yang Bukan Menjadi Kewenangan Penda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya													
3.11.05.2.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Pemusnahan				750.000,00		109.450.000 ,00		72.000.000, 00		72.000.000, 00		72.000.000, 00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Pemusnahan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Pemusnahan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta	0	1	750.000,00	1	109.450.000 ,00	1	72.000.000, 00	1	72.000.000, 00	1	72.000.000, 00		

KIDANG URUNAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGLATAN / SUKSES/KEGATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SABER RE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA SIKAN
			2025		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelembagaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya													
2.11.06 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGAWASAN TERHADAP GIZN LINGKUNGAN DAN GIZN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				40.000.000, 00		40.400.000, 00		41.208.000, 00		42.032.160, 00		42.452.482, 00		
Tingkat Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan yang Diberikan	Kuatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan dan PPLH	100	25	40.000.000, 00	27	40.400.000, 00	28	41.208.000, 00	29	42.032.160, 00	30	42.452.482, 00	2.11.0.00.0.0 0.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.06.2.61 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				40.000.000, 00		40.400.000, 00		41.208.000, 00		42.032.160, 00		42.452.482, 00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE RE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Laporan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha dan/atau Kegiatan	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	25	40	40.000.000, 00	40	40.400.000, 00	40	41.208.000, 00	40	42.032.160, 00	40	42.452.482, 00		
2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perilaku Berusaha atau Pemenuhan Peraturan terkait Pemenuhan Lingkungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				40.000.000, 00		40.400.000, 00		41.208.000, 00		42.032.160, 00		42.452.482, 00		
Seluruh Perilaku Berusaha atau Pemenuhan Peraturan terkait Pemenuhan Lingkungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	25	40	40.000.000, 00	40	40.400.000, 00	40	41.208.000, 00	40	42.032.160, 00	40	42.452.482, 00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASIS NI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.05 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				180.350.000 ,00		101.253.500 ,00		103.278.570 ,00		105.344.141 ,00		109.126.182 ,00		
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup Urusan Konservasi dan Kerusakan Lahan	Pertemuan Masyarakat yang Meningkatkan Kapabilitas/Kemampuan sa dalam Pelestarian Sumber Daya Alam	-	20	10.000.000, 00	40	10.100.000, 00	60	10.202.000, 00	80	10.306.040, 00	100	10.613.120, 00	2.11.05.05.01 0.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.05.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				180.350.000 ,00		101.253.500 ,00		103.278.570 ,00		105.344.141 ,00		109.126.182 ,00		
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Urusan Konservasi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Utama/Kegiatan yang terlibat	180	60 Orang	10.000.000, 00	60 Orang	10.100.000, 00	60 Orang	10.202.000, 00	60 Orang	10.306.040, 00	60 Orang	10.613.120, 00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SARJ RE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAKRAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dan Kerusakan Lehan														
2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup				10.000.000, 00		10.100.000, 00		10.302.000, 00		10.508.040, 00		10.613.120, 00		
Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Utama/Kegiatan yang terlibat	180	60 Orang	10.000.000, 00	60 Orang	10.100.000, 00	60 Orang	10.302.000, 00	60 Orang	10.508.040, 00	60 Orang	10.613.120, 00		
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup Urutan Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas	Pencapaian Masyarakat/Kelompok Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	100	20	170.350.000 ,00	40	91.153.500, 00	60	92.976.570, 00	80	94.836.101, 00	100	98.513.062, 00		
2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				180.350.000 ,00		101.253.500 ,00		103.278.570 ,00		105.344.141 ,00		109.126.182 ,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SABEL RE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pengembangan Kapasitas	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	2	2	170.350.000,00	2	91.153.500,00	2	92.970.570,00	2	94.836.101,00	2	98.513.062,00		
	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3	4		4		4		4		4			
2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				45.000.000,00		50.450.000,00		51.459.000,00		52.488.180,00		53.013.062,00		
Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3	4	45.000.000,00	4	50.450.000,00	4	51.459.000,00	4	52.488.180,00	4	53.013.062,00		
2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan				126.350.000,00		46.703.500,00		41.517.570,00		42.347.921,00		45.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SABEL NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat														
Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang mendukung kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	2	2	125.330.000,00	3	40.703.300,00	2	41.517.570,00	3	42.347.921,00	2	43.580.000,00		
2.11.09 - PROGRAM PENCIHRAKAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				30.000.000,00		30.300.000,00		30.906.000,00		31.524.120,00		31.839.361,00		
Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemertua Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	20	30.000.000,00	40	30.300.000,00	60	30.906.000,00	80	31.524.120,00	100	31.839.361,00	2.111.000.000.000.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASIS RE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000, 00		30.300.000, 00		30.900.000, 00		31.524.120, 00		31.839.361, 00		
Entitas Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	0	2	30.000.000, 00	2	30.300.000, 00	2	30.900.000, 00	2	31.524.120, 00	2	31.839.361, 00		
2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				30.000.000, 00		30.300.000, 00		30.900.000, 00		31.524.120, 00		31.839.361, 00		
Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	0	2	30.000.000, 00	2	30.300.000, 00	2	30.900.000, 00	2	31.524.120, 00	2	31.839.361, 00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE RE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Lingkungan Hidup														
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENCADUAN LINGKUNGAN HIDUP				8.000.000,0 0		8.080.000,0 0		8.241.500,0 0		8.406.432,0 0		8.490.496,0 0		
Terwujudnya Sengkleb/Kerusak Duguan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemenuhan Pemenuhan Sengkleb/Kerusak Duguan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup	100	100	8.000.000,0 0	100	8.080.000,0 0	100	8.241.500,0 0	100	8.406.432,0 0	100	8.490.496,0 0	2.11.0.00.0.0 0.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.19.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				8.000.000,0 0		8.080.000,0 0		8.241.500,0 0		8.406.432,0 0		8.490.496,0 0		
Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Komis Duguan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pengaduan pemenuhan Pencemaran dan Pencemaran Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikoreksi	5	5	8.000.000,0 0	5	8.080.000,0 0	5	8.241.500,0 0	5	8.406.432,0 0	5	8.490.496,0 0		
2.11.19.2.01.0000 - Pengelolaan Pengaduan				8.000.000,0 0		8.080.000,0 0		8.241.500,0 0		8.406.432,0 0		8.490.496,0 0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE KE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota														
Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditelaah	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditelaah	2	6	8.000.000,0 0	6	8.040.000,0 0	6	8.241.600,0 0	6	8.406.432,0 0	6	8.490.496,0 0		
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPULAHAN				5.632.633,0 00,00		5.814.590,3 00,00		5.842.686,4 00,00		6.089.237,1 22,00		6.097.639,5 00,00		
Meningkatnya Tata Kelola Persampulahan Urusan Kebersihan dan Pertamanan	Persentase Pemungutan Sampah di Wilayah Kabupaten	15,99	17,79	5.296.125,0 00,00	18,84	5.715.086,2 00,00	19,89	5.741.192,2 00,00	20,94	5.985.616,1 14,00	21,99	5.991.887,6 36,00	2.11.000.000 0.00.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah				5.623.225,0 00,00		5.805.086,2 00,00		5.832.942,2 00,00		6.079.252,1 14,00		6.086.639,5 00,00		
Indeks Pengelolaan Sampah Urusan Kebersihan dan	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di	17407	2044 0	5.296.125,0 00,00	2117 0	5.715.086,2 00,00	2190 0	5.741.192,2 00,00	2263 0	5.985.616,1 14,00	2336 0	5.991.887,6 36,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASIS KE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pertamanan	TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional													
2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				5.296.125,0 00,00		5.715.086,2 50,00		5.741.192,2 60,00		5.985.616,1 14,00		5.991.887,6 26,00		
Sampah yang terangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang terangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	17407	2044 0	5.296.125,0 00,00	2117 0	5.715.086,2 50,00	2190 0	5.741.192,2 60,00	2243 0	5.985.616,1 14,00	2336 0	5.991.887,6 26,00		
Meningkatnya Tata Kelola Penanganan Urusan Pengelolaan Pencemaran dan Pengendalian Kualitas	Pengelolaan Sampah (Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Pencuci Pengumpulan Sampah)	49,29	55	136.510.000 ,00	56,00	99.304.100, 00	57,10	101.494.182 ,00	58,15	103.621.008 ,00	59,20	105.751.934 ,00		
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah				5.823.225,0 00,00		5.905.086,2 50,00		5.832.992,2 60,00		6.079.282,1 14,00		6.086.639,5 60,00		
Indeks Pengelolaan Sampah Urusan Pengendalian	Jumlah Masyarakat, Kecompok Masyarakat atau Peta Pokok Lainnya yang Terlibat Aktif dalam	1	19	327.100.000 ,00	5	96.000.000, 00	5	91.800.000, 00	5	93.636.000, 00	5	94.751.934, 00		



WILAYAH / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SASARAN RE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2024		2025		2026		2027		2028			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kapasitas	Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat													
2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Bersama Masyarakat dalam Pengelolaan Pencemaran				327.100.000, 00		90.000.000, 00		91.800.000, 00		93.636.000, 00		94.751.934, 00		
Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1	19	327.100.000, 00	5	90.000.000, 00	5	91.800.000, 00	5	93.636.000, 00	5	94.751.934, 00		
2.11.11.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta				9.410.000,0 0		9.504.100,0 0		9.694.182,0 0		9.985.008,0 0		11.000.000, 00		
Unit Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak swasta	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kel ompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Pendataan Kinerja	1	30	9.410.000,0 0	30	9.504.100,0 0	30	9.694.182,0 0	30	9.985.008,0 0	30	11.000.000, 00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL2 RE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
2.11.11.2.03.0002 Penerapan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengabdian Sampah				9.410.000,0 0		9.504.100,0 0		9.694.182,0 0		9.985.000,0 0		11.000.000, 00		
Terlaksananya Penilaian Kinerja Unit/Unitas/Swasta/K elompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengabdian Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	Jumlah Unit/Unitas/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengabdian Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	1	1	9.410.000,0 0	30	9.504.100,0 0	30	9.694.182,0 0	30	9.985.000,0 0	30	11.000.000, 00		



4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Adapun program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan subkegiatan prioritas dalam mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2025-2030 seperti terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITYAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup				
1.	1.03.13 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Terwujudnya Kawasan Ruang Strategis Kabupaten Gunungkidul yang Optimal di Bidang Konservasi dan Kerusakan Lahan	1.03.13.5.02 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	
			1.03.13.5.02.0002 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	
			1.03.13.5.02.0003 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	
		Terwujudnya Kawasan Ruang Strategis Kabupaten Gunungkidul yang Optimal di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas	1.03.13.5.04 - Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	
2.	2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	1.03.13.5.04.0001 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	
			2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			2.11.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			2.11.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			2.11.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			2.11.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			2.11.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
			2.11.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			2.11.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

9

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			2.11.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			2.11.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			2.11.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			2.11.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			2.11.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			2.11.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			2.11.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
			2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			2.11.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
			2.11.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			2.11.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			2.11.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			2.11.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
3.	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tingkat Efektifitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak KRP	2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
			2.11.02.2.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	
4.	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Urusan Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
		Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Urusan Laboratorium	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
		Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Urusan Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas	2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
		Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Urusan Laboratorium	2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	
		Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Urusan Konservasi dan Kerusakan Lahan	2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
5.	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati urusan Konservasi dan Kerusakan Lahan	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati urusan Kebersihan dan Pertamanan	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
			2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati urusan Konservasi dan Kerusakan Lahan	2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	
			2.11.04.2.01.0009 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	
6.	2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.11.05.2.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	
7.	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
8.	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup Urusan Konservasi dan Kerusakan Lahan	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup Urusan Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
		Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup Urusan Konservasi dan Kerusakan Lahan	2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
		Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup Urusan Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas	2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat	
9.	2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
10.	2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Terselesaikannya Sengketa/Kasus Dugaan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	
11.	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya Tata Kelola Persampahan Urusan Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
		Meningkatnya Tata Kelola Persampahan Urusan Kebersihan dan Pertamanan	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
		Meningkatnya Tata Kelola Persampahan Urusan Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas	2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
		Meningkatnya Tata Kelola Persampahan Urusan Kebersihan dan Pertamanan	2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
		Meningkatnya Tata Kelola Persampahan Urusan Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas	2.11.11.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta 2.11.11.2.03.0002 - Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup

Sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, setiap Perangkat Daerah menetapkan

Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama ditetapkan mulai tahun 2025 sampai tahun 2030, dimana IKU tahun 2030 dipakai sebagai pijakan penyusunan RKPD tahun 2030 yang menjadi tanggung jawab kepala daerah tahun 2030-2034.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029. Adapun Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup selama periode 2025-2030 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup									
1.	Persentase kenaikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	-	-	19,75	18,3	19,67	18,23	18,2	
2.	Indeks Kualitas Air	Indeks	75,43	75,43	75,5	75,57	75,64	75,71	75,78	
3.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	72,11	72,11	72,36	72,61	72,86	73,11	73,36	
4.	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	60,9	60,9	60,93	60,96	60,99	61,02	61,05	

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. IKK memberikan gambaran mengenai keberhasilan pencapaian tujuan dan kinerja yang dicapai oleh suatu organisasi atau instansi pemerintah. Indikator Kinerja Kunci ditetapkan mulai tahun 2025 sampai tahun 2030, dimana IKK tahun 2030 dipakai sebagai pijakan penyusunan RKPD tahun 2030 yang menjadi tanggung jawab kepala daerah tahun 2030-2034.

Adapun Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup periode 2025-2030 seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	positif	Indeks	70.90	70.90	71.04	71.17	71.31	71.44	71.57	
2.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	positif	%	74.29	74.10	74	73	72	71	70	
3.	Tertaksananya Pengelolaan Sampah di wilayah Kab/Kota	positif	%	15.69	16.74	17.79	18.84	19.89	20.94	21.99	
4.	Timbulan sampah terolah difasilitas pengolahan sampah	positif	Ton	47459.52	47774.30	48030.70	48318.90	48606.80	48900.50	51834.50	

BAB V PENUTUP

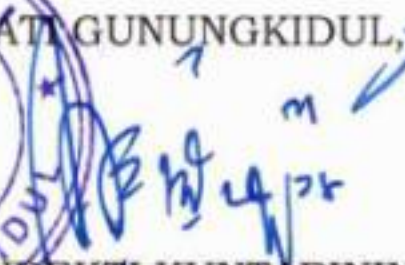
Rencana Strategi (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk 5 (lima) tahun mendatang. Renstra ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Lingkungan Hidup .

Perlu disadari bahwa masalah lingkungan sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Lingkungan Hidup. Untuk mengatasi kendala tersebut, maka tahap pertama perlu dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dengan baik. Tahap yang kedua adalah perlu adanya penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, antara lain dengan kabupaten/kota, perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha, sehingga rencana kegiatan dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Apabila hal tersebut dapat dilaksanakan, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistem pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu, berdaya guna dan berhasil guna. Untuk mencapai target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan tanggung jawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh staf Dinas Lingkungan Hidup. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh SDM yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, maka akan dapat mewujudkan Dinas Lingkungan Hidup sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan lingkungan secara optimal dan terpadu.

Semoga Renstra Dinas Lingkungan Hidup yang disusun dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

KEPALA,

ANTONIUS HARY SUKMONO

BUPATI
BURATI GUNUNGKIDUL,

ENDANG SUBEKTI KUNTARININGSIH

METADATA

NO	INDIKATOR	SATUAN	DIMENSI	RUMUS PERHITUNGAN	DESKRIPSI	SOURCES DATA	TARUHT								KBT	
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
INDIKATOR KUALITAS DASAR																
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	Tipe yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tanah (IKT).	Perhitungan IKLH Kabupaten/Kota yang telah melalui proses verifikasi sesuai dengan Peraturan LHK No 27/2023 adalah: $IKLH = 0,375 \times (IKA) + 0,405 \times (IKU) + 0,219 \times (IKT)$	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan rentang angka: 1. Sangat Baik : $90 \leq x < 100$ 2. Baik : $70 \leq x < 90$ 3. Cukup : $50 \leq x < 70$ 4. Buruk : $25 \leq x < 50$ 5. Sangat Buruk : $0 \leq x < 25$ Keterangan: Terhadap perhitungan baru terdapat komponen IKLH berdasarkan surat terdapat PPKL, ELJH, Raster 0.1/0.05/PPKL/PPKLT/ PPKL 1.1/0.05/2024 Perubahan Raster IKLH 2023, dengan catatan perubahan Raster 1.002: Perubahan parameter air 0.5 sehingga nilai perantara IKLH sesuai dengan perubahan parameter. Perubahan Perantara: 2.00A. Perubahan metode perhitungan sesuai metode IKLH 2023 (skala basis 100, bukan 1000). Perubahan nilai parameter, dan untuk disesuaikan dengan kelas Raster. 3.00. 25 Interaksi antara lahan (diklasifikasi dalam perhitungan IKLH) berdasarkan Raster 70 dan memasukkan faktor variabel (diklasifikasi dalam PPKL) lagi. Hal yang sama juga dengan perubahan Raster.	Deskripsi yang digunakan dalam perhitungan IKLH: metode fact-fact, pengukuran kualitas lingkungan pada waktu tertentu, dan wilayah lain yang dilakukan oleh LHK.	72,38	70,9	71,04	71,07	71,10	71,14	71,17	71,20	71,23	ICP RPJPD 2025 RPJPD esensi regional dan kabupaten

[illegible]

[illegible]

**PERUMBUHAN TARGET INDIKATOR SASARAN RENSTRA 2025-2029
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Bidang	Indikator Bidang	Program/Indikator Program/Definisi Indikator	Definisi	Interpretasi	Sumber Penghitungan Indikator	Target					Catatan
						2024	2027	2028	2029	2030	
Pengelolaan Ruang Perumahan, Perkotaan dan Perdesaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Ruang - Indeks Kualitas Ruang Perkotaan - Indeks Kualitas Ruang Perdesaan	PROGRAM PEMERINTAHAN KOTA/KABUPATEN/KOTA									
		Persentase Pemertan Ruang Perkotaan yang memenuhi syarat	Mengukur besaran luas lahan perkotaan yang memenuhi syarat	Semakin tinggi semakin baik	1. Luas lahan perkotaan yang memenuhi syarat / 2. Luas lahan perkotaan yang direncanakan x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indeks KRI
		Persentase Ruang dan Perumahan Perkotaan yang memenuhi syarat	Mengukur persentase lahan perumahan perkotaan yang memenuhi syarat	Semakin tinggi semakin baik	1. Luas lahan perumahan yang memenuhi syarat / 2. Luas lahan perumahan yang direncanakan x 100%	73,22%	77,78%	81,33%	88,89%	94,44%	Indeks PIRK total kapabilitas 18 2024 : 13 2027 : 14 kapabilitas 2028 : 15 kapabilitas 2029 : 16 kapabilitas 2030 : 17 kapabilitas tiap tahun peningkatan 1 skord
		PROGRAM PERUMHO URUSAN PEMERINTAHAN KOTA/KABUPATEN/KOTA									
		Rata-Rata Akumulatif Kinerja Perumahan Perkotaan (AKPP)	Rata-Rata Akumulatif Kinerja Perumahan Perkotaan (AKPP) adalah rata-rata yang menggambarkan pencapaian kinerja perumahan perkotaan melalui indikator kinerja perumahan perkotaan	A (Rata-Rata >90-100) : Sangat Baik B (Rata-Rata >75-90) : Baik C (Rata-Rata >60-75) : Cukup D (Rata-Rata >45-60) : Kurang E (Rata-Rata >30-45) : Buruk	1. Rata-Rata Akumulatif Kinerja Perumahan Perkotaan (AKPP) adalah rata-rata yang menggambarkan pencapaian kinerja perumahan perkotaan melalui indikator kinerja perumahan perkotaan	83,33%	83,33%	84,22%	84,89%	85,33%	Sekolah DUK - RDK
Pengelolaan Ruang Perumahan, Perkotaan dan Perdesaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Ruang - Indeks Kualitas Ruang Perkotaan - Indeks Kualitas Ruang Perdesaan	PROGRAM PERUMHO URUSAN PEMERINTAHAN KOTA/KABUPATEN/KOTA									
		Persentase Ruang dan Perumahan Perkotaan yang memenuhi syarat	Mengukur persentase lahan perumahan perkotaan yang memenuhi syarat	Semakin tinggi semakin baik	1. Luas lahan perumahan yang memenuhi syarat / 2. Luas lahan perumahan yang direncanakan x 100%	80%	81%	82%	83%	84%	Indeks PIRK - Data (Laporan Tahunan Tahunan) : LRI, LPI, dan Amdal - Laporan tahunan telah sesuai untuk pemertan lahan sesuai peraturan (Kawasan Perkotaan/Kawasan Perkotaan) : LRI, LPI, dan Amdal

Rencana	Indikator Rencana	Program/Indikator Program/Definisi Indikator	Definisi	Indikator	Rumus Penghitungan Indikator	Target					Keterangan
						2016	2017	2018	2019	2020	
		PROSEDUR PENGENDALIAN PERENCANAAN DAS/RT/RW KERUKUNGAN LINGKUNGAN HIDUP									
		Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Kondisi Basah	Mengukur kualitas lingkungan hidup yang tidak terdapat pencemaran indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	Bersedia secara valid indeks kualitas air dan indeks kualitas kualitas udara, mencakup hasil kualitas lingkungan hidup	$(\text{Index KSA} + \text{Index KLU}) / 2$	71,50%	73,84%	75,24%	77,50%	78,50%	- Melong 70% - Nilai KLU dan KSA diperoleh dari RPTDAS/RT (tabel KLUAS)
		Pemantauan parameter yang dapat diuji	Mengukur parameter jumlah parameter yang dapat diuji pada tahun berjalan dibandingkan dengan target parameter yang dapat diuji pada tahun 2020 dengan 2020 : 34 parameter	Bersedia banyak parameter yang dapat diuji, mencakup hasil kualitas UPT Kabupaten	$(\text{Jl parameter yang dapat diuji pada tahun berjalan} / \text{Jl target parameter yang dapat diuji tahun 2020}) \times 100\%$	86,24%	91,18%	94,12%	97,06%	100,00%	UPT Basah
		Pemantauan Laporan Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah yang Terpenuhi dan Terpenuhi	Mengukur Jumlah Laporan Informasi Kinerja Lingkungan Hidup yang dapat terpenuhi dan terpenuhi pada tahun berjalan	Bersedia dokumen yang dapat terpenuhi dan terpenuhi sesuai	$(\text{Jl Laporan yang terpenuhi} / \text{Jl Laporan yang terpenuhi}) \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	Melong 90%
		PROSEDUR PENGENDALIAN KERUKUNGAN LINGKUNGAN HIDUP									
		Pemantauan Tindakan Perbaikan Kerusakan dengan Basah	Mengukur tingkat keberhasilan tindakan perbaikan	Bersedia banyak bentuk perbaikan yang terpenuhi dengan baik mencakup hasil pemantauan lingkungan	$(\text{Jl Tindakan perbaikan yang terpenuhi dengan baik} / \text{Jl Tindakan perbaikan yang ada}) \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	- UPT KUP - Jumlah tahun yang mencapai keberhasilan DLK RT sesuai dengan tahun yang ada terpenuhi oleh DLK UPT KUP
		Pemantauan RTN	Mengukur pemantauan Kondisi RTN yang ada mencakup hasil kinerja yang dicapai	Bersedia hasil pemantauan RTN yang ada mencakup hasil kinerja yang dicapai	$(\text{Luas RTN PUIK} + \text{Luas Kondisi Basah} / \text{Luas RTN PUIK}) \times 100\%$	98,20%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	- Melong 90% - Data yang diperoleh data hasil pemantauan tahun - Kondisi Basah jika ada pemantauan RTN
		PROSEDUR PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAS/RT/RW KERUKUNGAN LINGKUNGAN HIDUP									

Rencana	Indikator Rencana	Program/Indikator Program/Definisi Indikator	Definisi	Interpretasi	Rencana Penghitungan Indikator	Target					Keterangan
						2026	2027	2028	2029	2030	
		Penyusunan rencana 33 yang terintegrasi	Mengajukan perencanaan keuangan berbasis SD yang diarahkan pada aspek-aspek yang terintegrasi dengan baik	tergolong rendah (nilai 33 yang diarahkan pada aspek-aspek yang terintegrasi dengan baik) / 1. dan diarahkan pada aspek-aspek yang terintegrasi dengan baik (nilai 33 yang diarahkan)	33. Lintang 33 pada 1 aspek diarahkan dengan yang terintegrasi dengan baik / 1. dan diarahkan pada aspek-aspek yang terintegrasi dengan baik (nilai 33 yang diarahkan)	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	Salah satu aspek yang terintegrasi dengan baik (nilai 33 yang diarahkan)
		PROSEDUR PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN TERPADU (PPT) LINGKUNGAN DAS (LSD) PERUMBAHAN DAN PERENCANAAN LINGKUNGAN (PPL)									
		Salah satu aspek yang terintegrasi dengan baik (nilai 33 yang diarahkan)	Mengajukan perencanaan keuangan berbasis SD yang diarahkan pada aspek-aspek yang terintegrasi dengan baik (nilai 33 yang diarahkan)	tergolong rendah (nilai 33 yang diarahkan pada aspek-aspek yang terintegrasi dengan baik) / 1. dan diarahkan pada aspek-aspek yang terintegrasi dengan baik (nilai 33 yang diarahkan)	33. Lintang 33 pada 1 aspek diarahkan dengan yang terintegrasi dengan baik / 1. dan diarahkan pada aspek-aspek yang terintegrasi dengan baik (nilai 33 yang diarahkan)	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	Salah satu aspek yang terintegrasi dengan baik (nilai 33 yang diarahkan)
		PROSEDUR PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN TERPADU (PPT) LINGKUNGAN DAS (LSD) PERUMBAHAN DAN PERENCANAAN LINGKUNGAN (PPL)									
		Salah satu aspek yang terintegrasi dengan baik (nilai 33 yang diarahkan)	Mengajukan perencanaan keuangan berbasis SD yang diarahkan pada aspek-aspek yang terintegrasi dengan baik (nilai 33 yang diarahkan)	tergolong rendah (nilai 33 yang diarahkan pada aspek-aspek yang terintegrasi dengan baik) / 1. dan diarahkan pada aspek-aspek yang terintegrasi dengan baik (nilai 33 yang diarahkan)	33. Lintang 33 pada 1 aspek diarahkan dengan yang terintegrasi dengan baik / 1. dan diarahkan pada aspek-aspek yang terintegrasi dengan baik (nilai 33 yang diarahkan)	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	Salah satu aspek yang terintegrasi dengan baik (nilai 33 yang diarahkan)
		PROSEDUR PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN TERPADU (PPT) LINGKUNGAN DAS (LSD) PERUMBAHAN DAN PERENCANAAN LINGKUNGAN (PPL)									
		Salah satu aspek yang terintegrasi dengan baik (nilai 33 yang diarahkan)	Mengajukan perencanaan keuangan berbasis SD yang diarahkan pada aspek-aspek yang terintegrasi dengan baik (nilai 33 yang diarahkan)	tergolong rendah (nilai 33 yang diarahkan pada aspek-aspek yang terintegrasi dengan baik) / 1. dan diarahkan pada aspek-aspek yang terintegrasi dengan baik (nilai 33 yang diarahkan)	33. Lintang 33 pada 1 aspek diarahkan dengan yang terintegrasi dengan baik / 1. dan diarahkan pada aspek-aspek yang terintegrasi dengan baik (nilai 33 yang diarahkan)	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	Salah satu aspek yang terintegrasi dengan baik (nilai 33 yang diarahkan)
		PROSEDUR PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN TERPADU (PPT) LINGKUNGAN DAS (LSD) PERUMBAHAN DAN PERENCANAAN LINGKUNGAN (PPL)									
		Salah satu aspek yang terintegrasi dengan baik (nilai 33 yang diarahkan)	Mengajukan perencanaan keuangan berbasis SD yang diarahkan pada aspek-aspek yang terintegrasi dengan baik (nilai 33 yang diarahkan)	tergolong rendah (nilai 33 yang diarahkan pada aspek-aspek yang terintegrasi dengan baik) / 1. dan diarahkan pada aspek-aspek yang terintegrasi dengan baik (nilai 33 yang diarahkan)	33. Lintang 33 pada 1 aspek diarahkan dengan yang terintegrasi dengan baik / 1. dan diarahkan pada aspek-aspek yang terintegrasi dengan baik (nilai 33 yang diarahkan)	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	Salah satu aspek yang terintegrasi dengan baik (nilai 33 yang diarahkan)

[illegible]

Sumber	Indikator Kinerja	Program/Indikator Program/Indikator Indikator	Indikator	Indikator	Rencana Penghitungan Indikator	Target					Estimasi
						2024	2025	2026	2027	2028	
		Penerapan program sampah di wilayah Kabupaten	- Mengukur Jumlah Sampah yang dapat terdistribusi di Wilayah Kabupaten - Data diambil dari media sampah kabupaten	Semakin banyak sampah yang dapat terdistribusi semakin baik kinerja yang dicapai	$(\frac{X}{Y} \times 100)$ Total Volume Sampah yang dapat terdistribusi / Y Total Volume Terdistribusi Sampah Tahun Berjalan Kabupaten/Kota X > 100%	17,75%	18,84%	19,93%	20,94%	21,96%	LPT 63